

346. 0432

LUK

P 21

**PEMANFAATAN TANAH KALAKERAN
FAMILI/KELUARGA DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
DI DESA TARAITAK KECAMATAN LANGOWAN
KABUPATEN MINAHASA PROPINSI SULAWESI UTARA**



TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2**

Magister Kenotariatan

Oleh :

TJITRA D.P. LUKUM

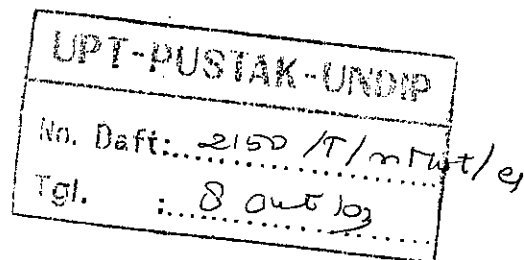
B4B.000207

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

**JUNI
2003**

UPT-PUSTAK-INDIP

TESIS



**PEMANFAATAN TANAH KALAKERAN
FAMILI/KELUARGA DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
DI DESA TARAITAK KECAMATAN LANGOWAN
KABUPATEN MINAHASA PROPINSI SULAWESI UTARA**

disusun oleh :

Tjitra D.P. Lukum

B4B.000207

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 12 Juni 2003
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui,
Komisi Pembimbing :

Pembimbing Utama

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'I.G.N. Sugangga'.

(Prof. I.G.N. SUGANGGA, S.H.)
NIP : 130359063

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'I.G.N. Sugangga'.

(Prof. I.G.N. SUGANGGA, S.H.)
NIP : 130359063

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Juni 2003

Yang menyatakan,

Tjitra D.P. Lukum

Persembahan bagi :

**Kedua Orang Tuaku tercinta,
Syamsuddin Lukum, SH dan Dra. Nancy G.PH Jacobs
Adik-adikku Taufiek, Cakra, Heri dan
Suamiku Achmad Arifin,SH serta
Keponakanku Ghitrif**

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul : **"PEMANFAATAN TANAH KALAKERAN FAMILI/KELUARGA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DESA TARAITAK KECAMATAN LANGOWAN KABUPATEN MINAHASA PROPINSI SULAWESI UTARA."**

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis yakin tesis ini masih jauh dari sempurna dan harapan, oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis sangat menyadari, bahwa tesis ini juga dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Segala bantuan,

budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya.

Meskipun hanya beberapa nama yang disebutkan di sini, tidak berarti bahwa penulis melupakan yang lain. Tanpa dukungannya tidak mungkin penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Dari lubuk hati yang dalam penulis sampaikan rasa hormat dan banggaku kepada kedua orang tuaku, ayahanda **Syamsuddin Lukum, SH** dan ibunda **Dra. Nancy G.PH Jacobs**, yang telah membesarkan, mendidik, menasehati serta mendo'akan yang tiada henti-hentinya sampai hari ini serta hormat dan banggaku kepada mertuaku Bapak **Arifin Fatholah** dan ibu **Maryam** yang selalu berdo'a untuk keselamatan dan kesuksesan penulis.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan sewaktu penelitian guna penulisan tesis ini, antara lain kepada :

1. Bapak **Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc** selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak **Prof. Dr. Soeharyo Hadisaputro, dr.Sp.PD(K)** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

3. Bapak **H. Achmad Busro, S.H., MHum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak **Prof. I.G.N. Sugangga, SH** selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan Pembimbing dalam penulisan tesis ini yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini.
5. Bapak **R. Suharto, S.H., MHum** selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Bapak **Bambang E.T. SH., MH** selaku Dosen Wali pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
7. Para guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus menularkan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan .
8. Tim Reviewer proposal penelitian serta Tim Penguji tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro
9. Para tokoh masyarakat/tetua adat di Minahasa yang telah bersedia menjadi responden dan dengan bersahabat memberi data yang penulis

butuhkan. Tanpa bantuan Bapak sekalian tesis ini tidak mungkin terwujud.

10. Staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberi bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
11. Bapak **Prof. Drs. W.T. Palar, SH.,** Ibu **Silvy Ranti, SH., Msi,** Bapak **Rianto Maluegha, SH., MH** selaku dosen pada Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado Sulawesi Utara yang telah memberi bantuan bahan-bahan penulisan, semangat serta dorongan selama penulis melakukan penelitian dan menyusun tesis ini.
12. Rekan-rekan mahasiswa/wi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (Angkatan 2000), khususnya Mbak **Lian, Mardiana, Eva Devi,** Bapak **Suharta Yasa** dan **Dugi Cahyono** yang telah begitu banyak membantu, mendorong dan menjadi mitra diskusi selama penulis menjadi mahasiswa hingga penyelesaian tesis ini.
13. Adik-adikku **Taufiek, Cakra, Heri,** dan adik iparku **Lina** serta keponakanku **Ghitrif** yang selalu berdoa untuk keselamatan dan kesuksesan penulis.

Akhirnya untuk suamiku tercinta **Achmad Arifin, SH,** penulis ucapkan banyak terima kasih yang telah dengan tulus ikhlas, setia menanti dan selalu memberi dukungan do'a serta nasehat kepada penulis selama menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.

Karena menyadari kekurangsempurnaan penulisan tesis ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca sekalian untuk memberikan kritikan dan saran-saran yang membangun.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum agraria pada khususnya.

Wassalam Wr. Wb.

Semarang, Juni 2003

Penulis,

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PENGESAHAN | |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| ABSTRAK | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah..... | 10 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| 1.4. Kontribusi Penelitian..... | 11 |
| 1.5. Sistematika Penulisan | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1. HAK ULAYAT DI INDONESIA | 13 |
| 2.1.1. Pengertian Hak Ulayat | 13 |
| 2.1.2. Berlakunya Hak Ulayat | 15 |
| 2.1.3. Hubungan Timbal Balik Tanah Hak Ulayat Dengan Individu | 25 |
| 2.1.3.1. Berlakunya ke dalam | 26 |
| 2.1.3.2. Berlakunya ke luar | 31 |
| 2.1.3.3. Benda (obyek) daripada " <i>Beschikingsrecht</i> " | 35 |
| 2.2. TANAH KALAKERAN DI MINAHASA..... | 39 |
| 2.2.1. Pengertian Tanah <i>Kalakeran</i> | 39 |
| 2.2.2. Asal Mula Tanah <i>Kalakeran</i> | 45 |
| 2.2.3. Berbagai Macam Tanah <i>Kalakeran</i> | 51 |
| 2.2.4. Pemanfaatan Tanah <i>Kalakeran</i> Menurut Hukum Adat..... | 54 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1. Metode Pendekatan..... | 56 |
| 3.2. Sumber Data | 57 |
| 3.2.1. Penelitian Kepustakaan (<i>Library Research</i>) | 57 |
| 3.2.2. Penelitian Lapangan (<i>Field Research</i>) | 57 |
| 3.3. Tehnik Pengumpulan Data | 58 |
| 3.3.1. Studi Kepustakaan..... | 58 |

| | |
|--|----|
| 3.3.2. Studi Lapangan | 58 |
| 3.4. Tehnik Pengolahan Data | 59 |
| 3.5. Metode Analisa Data | 59 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| 4.1. HASIL PENELITIAN | 61 |
| 4.1.1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian | 61 |
| 4.1.2. Status Tanah di Kabupaten Minahasa | 63 |
| 4.2. PEMBAHASAN | 65 |
| 4.2.1. Penguasaan Tanah di Minahasa | 65 |
| 4.2.2. Wewenang Masyarakat Hukum Adat atas Tanah Kalakeran di Minahasa Dewasa ini | 74 |
| 4.2.3. Pemanfaatan Tanah Kalakeran oleh Masyarakat | 85 |
| 4.2.4. Sikap Masyarakat Untuk Mempertahankan Tanah Kalakeran Sebagai Tanah Adat | 92 |
| 4.2.5. Kendala-kendala Pemanfaatan Tanah Kalakeran Untuk Pembangunan | 93 |
| BAB V PENUTUP | |
| 5.1. Kesimpulan | 95 |
| 5.2. Saran-saran | 96 |
| RINGKASAN | 97 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Judul | Halaman |
|-------|--------------------------------------|---------|
| 1. | Luas Wilayah Kabupaten Minahasa..... | 61 |
| 2. | Penyebaran Penggunaan Tanah..... | 62 |

ABSTRAK

Satu di antara sekian banyak permasalahan yang dihadapi berkenaan dengan masalah tanah di negara kita adalah mengenai permasalahan tanah yang terletak dalam lingkungan suatu masyarakat Hukum Adat, di mana kadangkala terjadi benturan antara persoalan kewenangan masyarakat Hukum Adat setempat di satu pihak dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan tanah-tanah untuk kepentingan pembangunan yang dapat menghambat lajunya pembangunan di negara Indonesia.

Tanah dalam masyarakat Hukum Adat mempunyai arti dan status yang tersendiri bilamana dibandingkan dengan harta benda lainnya, oleh karena itu masalah tentang tanah mempunyai kaitan yang sedemikian eratnyanya dengan masalah tentang kewenangan dari masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, baik menyangkut kewenangan dari masyarakat Hukum adat untuk menguasai tanah yang masih ada dalam lingkungan masyarakatnya maupun dalam hubungannya dengan penguasaan tanah oleh warga masyarakat untuk memanfaatkan tanah tersebut dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya.

Di Sulawesi Utara (khususnya di Kabupaten Minahasa) terdapat hamparan tanah milik adat yang dikenal dengan nama tanah *kalakeran* yang luasnya mencapai 80% dari luas wilayah Kabupaten Minahasa (\pm 335.136 Ha), yang pada kenyataannya sampai sekarang masih ada dan masih banyak belum terdaftar atau belum semuanya mempunyai sertifikat yang dikarenakan berbagai masalah/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Meningkatnya kebutuhan dan terbatasnya persediaan tanah untuk kepentingan pembangunan, menyebabkan tanah *kalakeran* sebagai tanah adat mendapat perhatian sebagai salah satu alternatif pengadaan tanah untuk lahan pembangunan. Mengenai masalah tanah *kalakeran* di Minahasa yang sejak dulu sampai dengan sekarang adalah masalah yang rumit, karena tidak adanya suatu peraturan tertulis secara khusus mengaturnya.

Untuk itu agar pemanfaatan tanah *kalakeran* sebagai tanah adat berguna dan bermanfaat bagi kepentingan pembangunan, kiranya pihak yang terkait dalam hal ini para tokoh masyarakat adat dan Pemerintah Daerah maupun Pusat untuk segera merumuskan suatu peraturan tertulis mengenai tanah *kalakeran*, demi kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah-tanah *kalakeran* tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Persoalan tentang tanah dan pertanahan di negara Indonesia dewasa ini merupakan suatu persoalan yang banyak sekali mendapat perhatian dari berbagai pihak yang meninjaunya dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini disebabkan oleh karena peka dan sensitifnya masalah dimaksud dalam kehidupan bermasyarakat yang bukan hanya sekedar menyangkut aspek ekonomis dan kesejahteraan semata, akan tetapi mempunyai kaitan yang erat sekali dengan masalah sosial, politis, yuridis, psikologis, kulturil dan religius.

Dalam memecahkan berbagai masalah yang berkenaan dengan tanah bukan saja hanya mengindahkan prinsip-prinsip hukum (yuridis) akan tetapi juga harus memperhatikan azas kesejahteraan (*prosperity*), azas ketertiban keamanan (*security*) dan azas kemanusiaan (*humanity*) agar masalah-masalah pertanahan tersebut tidak berkembang menjadi keresahan yang mengganggu stabilitas masyarakat.¹

Satu di antara sekian banyak permasalahan yang dihadapi berkenaan dengan soal tanah ini adalah mengenai persoalan tanah yang terletak dalam

¹ Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat, Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung, 1987, hal. 51.

lingkungan suatu masyarakat hukum adat yang kadang-kadang terjadi benturan antara persoalan kewenangan masyarakat hukum adat setempat di satu pihak dan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan tanah-tanah untuk kepentingan pembangunan yang dapat menghambat lajunya pembangunan di negara Indonesia. Hal yang demikian perlu mendapat perhatian yang serius dalam rangka melaksanakan Politik Agraria Nasional.

Tumbuh dan berkembangnya hukum adat dari suatu masyarakat adalah tergantung dari struktur masyarakat hukum adat (*adatrecht gemeenschap*) yang merupakan pendukung dan pelaksana hukum adat dalam proses kehidupan mereka. Di samping itu hukum adat secara keseluruhan adalah juga merupakan pendukung dari pada infrastruktur masyarakat hukum adat bersangkutan dan sekaligus merupakan dasar kewenangan bagi masyarakat untuk bertindak dalam proses hukum. Sehingga oleh karenanya antara hukum adat di satu pihak dan masyarakat hukum adatnya di lain pihak terdapat suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya.

Sehingga adalah wajar bilamana seseorang berkeinginan untuk mempelajari hukum adat mengenai tanah di suatu daerah di Indonesia untuk mengetahui terlebih dahulu struktur masyarakat yang bersangkutan. Mengenai hal ini sebelumnya sudah dikemukakan oleh Van Vollenhoven bahwa :

“untuk mengetahui hukum maka adalah terutama perlu diselidiki buat

waktu apapun pun dan di daerah manapun juga sifat dan susunan persekutuan hukum di mana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari-hari.”²

Adapun struktur masyarakat hukum adat Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut :

Bahwa di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, serta orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya menurut kodrat alam. Tidak ada seorangpun dari mereka yang mempunyai pikiran kemungkinan pembubaran golongan itu.

Golongan manusia tersebut mempunyai pula pengurus sendiri dan mempunyai harta benda, milik keduniaan dan milik gaib. Golongan yang demikianlah yang bersifat persekutuan hukum.³

Secara singkat apa yang dikemukakan di atas bahwa yang dinamakan dengan masyarakat hukum adat (*adatrecht gemeenschap*) adalah tidak lain dari pada kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, di mana para anggota kesatuan masing-masing

² Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan Soebekti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hal. 15.

³ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hal. 207.

mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun di antara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah bertumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.⁴

Struktur dari pada masyarakat hukum adat ini ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor geneologis dan faktor teritorial, pada mulanya faktor geneologis mempunyai dominasi yang sangat kuat sekali terhadap pembentukan suatu masyarakat hukum adat di mana pada umumnya disebabkan oleh karena adanya suatu hubungan darah antara satu dengan lainnya mereka menjadi terikat dan terbentuk dalam satu ikatan. Akan tetapi semakin meluasnya hubungan antar suku bangsa, dominasi faktor geneologis secara sedikit demi sedikit mulai tergeser dan digantikan dengan faktor teritorial di mana faktor daerah wilayah yang paling menentukan bagi terbentuknya masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sekalipun mungkin di sana-sini kedua faktor tersebut menjadi faktor penentu secara jalin-menjalin antara satu dengan lainnya.

Dalam perkembangan sekarang di mana faktor geneologis masih memegang peranan yang cukup kuat, maka timbullah masyarakat hukum adat yang bercorak kebapakan (*patrilineal*) atau bercorak keibuan (*matrilineal*) atau memperlihatkan kombinasi antara keduanya (*parental*) dengan corak

⁴ R. Roestandi Ardiwilaga, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Masa Bakti, Jakarta, 1962, hal. 23.

dan polanya sendiri-sendiri. Sedangkan dalam masyarakat tertentu di mana faktor teritorial sudah cukup dominasi, maka struktur masyarakatnya dapat berbentuk masyarakat desa (*Dorp gemeenschap*), masyarakat wilayah (*Streekgemeenschap*) ataupun berupa gabungan desa (*Dorpenbond*).

Di samping itu sifat kebhinekaan masyarakat Indonesia menimbulkan pengaruh yang tidak kecil bagi struktur masyarakat hukum adat Indonesia yang telah menimbulkan berbagai lingkaran-lingkaran hukum adat dengan variasi perbedaan hukum adat antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.

Masyarakat hukum adat dapat dipandang sebagai suatu kesatuan yang bulat di mana masing-masing anggota persekutuan sudah menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada para fungsionaris yang melaksanakan kepemimpinan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian warga masyarakat yang bersangkutan sudah mengakui adanya kewenangan dari masyarakat tempat mereka hidup, wewenang mana dijalankan oleh kepala masyarakat hukum adat yang dengan disertai para pembantunya. Kepala masyarakat hukum adat ini menjalankan tugas pokoknya menjamin stabilitas masyarakat dari berbagai gangguan berupa pelanggaran hukum, melaksanakan tugas pemulihan stabilitas masyarakat yang sudah terganggu sebagai akibat dari pada pelanggaran hukum di samping melakukan tindakan mengenai urusan yang berkenaan dengan tanah yang ada di wilayah persekutuan dan melayani masyarakat dalam menyelesaikan persoalan di berbagai sektor kehidupan lainnya.

Dari gambaran umum tentang struktur masyarakat hukum adat di Indonesia sudah dapat dilihat betapa eratnya hubungan antara masyarakat hukum dengan tanah di mana anggota masyarakatnya bertempat tinggal. Hubungan yang demikian bukan hubungan yang bersifat yuridis semata, akan tetapi juga menunjukkan hubungan yang bersifat magis religius.

Banyak hal yang menyebabkan timbulnya hubungan yang sedemikian erat antara warga masyarakat hukum adat dengan tanah, karena sifat dari pada tanah itu sendiri sebagai suatu harta kekayaan yang dipandang bersifat kekal karena tidak akan musnah dalam keadaan bagaimanapun juga, di samping berbagai kenyataan yang dialami di mana tanah berfungsi sebagai tempat tinggal bagi warga masyarakat, sebagai tempat mereka mencari tempat kehidupan, sebagai tempat di mana nantinya akan dikuburkan kalau meninggal dunia dan lagi dalam pandangan yang bersifat magis religius sebagai tempat tinggal roh dari leluhur yang mereka anggap sebagai pelindung persekutuan.

Berdasarkan atas kenyataan ini, maka tanah dalam masyarakat hukum adat mempunyai arti dan status yang tersendiri bilamana dibandingkan dengan harta benda lainnya, oleh karena itu masalah tentang tanah mempunyai kaitan yang sedemikian eratnya dengan kewenangan dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, baik yang menyangkut kewenangan dari masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah yang masih ada dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun dalam hubungannya dengan penguasaan tanah oleh warga

masyarakat yang bersangkutan untuk memanfaatkan tanah tersebut, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu dan lain sebagainya.

Menurut konsepsi hukum adat segala tanah yang ada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan ada dalam kekuasaan dari pada masyarakat itu sendiri. Adanya penguasaan yang demikian bukan berarti bahwa masyarakat hukum adat tersebut memiliki tanah tersebut, karena pemilik yang sebenarnya dari pada tanah dimaksud adalah kekuatan yang bersifat supranatural, sehingga dengan demikian seluruh anggota masyarakat mengakui akan adanya kewenangan dari pada masyarakat atas tanah.

Penguasaan masyarakat terhadap tanah-tanah yang ada di dalam wilayahnya tidak dapat dipersamakan dengan *Eigendomsrecht* atau *Bezit recht* yang dilakukan secara bersama oleh warga masyarakat sebagai mana yang dikenal dalam konsepsi hukum barat. Hubungan dimaksud adalah laksana seorang tuan dengan bawahan yang diperintah/dikuasainya. Wewenang yang demikian di kalangan masyarakat hukum adat di Indonesia pada beberapa tempat disebut dengan istilah yang berbeda, seperti :

"*patuanan* di Ambon artinya lingkungan kepunyaan; *payampeto* di Kalimantan artinya daerah bahan makanan; *panyanturui* di Kalimantan artinya penetapan; *pawatasan* di Kalimantan; *wewengkon* di Jawa; *prabumian* di Bali artinya daerah yang berbatas; *totabuan* di Bolaang Mongondow artinya tanah yang terlarang bagi orang lain; *pertuanan* di Batak; *simelungun* Sumatera Timur; *kawasan* di Indragiri; *torluk* di Angkola; *lombo* di Sulawesi Selatan, *nuru* di Buru; *paer* di Lombok; *ulayat* di Minangkabau artinya daerah kekuasaan wali,

pengurus, kepala daerah dan lain sebagainya, *Pakasaan* dan *Kalakeran* di Minahasa.⁵

Hak ulayat yang juga disebut dengan berbagai istilah tersebut adalah hak dari persekutuan hukum untuk menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih merupakan hutan belukar di dalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya, atau guna kepentingan orang-orang luaran (orang pendatang, orang asing) akan tetapi dengan izinnnya dan senantiasa dengan pembayaran pengakuan (*recognitie*) dalam pada itu persekutuan hukum itu tetap campur tangan, secara keras atau tidak, juga atas tanah-tanah yang telah diusahakan orang yang terletak di dalam lingkungan wilayahnya.

Wewenang yang demikian menurut istilah Van Vollenhoven disebut "*Beschikkingrecht*"⁶ atau hak menguasai secara sepenuhnya, untuk bahasa Indonesia istilah ini diterjemahkan dalam berbagai istilah seperti hak Per-tuanan, hak ulayat, Hak Purba dan lain sebagainya.⁷ Sesuai dengan peristilahan yang dipergunakan secara resmi dalam UUPA, maka untuk selanjutnya penulis akan mempergunakan istilah hak ulayat tersebut.

Beschikkingrecht tersebut menurut Van Vollenhoven mempunyai tanda sebagai berikut :⁸

- a. Persekutuan hukum itu dan anggota-anggotanya dapat memper-gunakan tanah hutan belukar di dalam wilayahnya dengan bebas,

⁵ Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Sumur, Bandung, 1964, hal. 43.

⁶ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukurn Adat*, Penerbit Universitas, Jakarta, 1967, hal. 43.

⁷ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 54.

⁸ Adiwinata, *Pengertian Hukum Adat Menurut UUPA*, Alumni, Bandung, 1976, hal. 31.

- seperti membuka tanah, mendirikan perkampungan, memungut hasilnya, berburu, mengembala dan lain sebagainya.
- b. Yang bukan anggota dan persekutuan hukum dapat pula mempergunakan hak itu, tetapi hanya atas pemberian izin dari persekutuan hukum itu, tanpa izin ia membuat kesalahan.
 - c. Dalam mempergunakan tanah itu, bagi anggota hanya kadang-kadang tapi yang bukan anggota selalu harus membayar sesuatu (*recognitie*).
 - d. Persekutuan hukum mempunyai tanggung jawab atas beberapa kejahatan yang tertentu yang terjadi di dalam lingkungan wilayahnya, bilamana orang yang melakukan kejahatan itu sendiri tidak dapat digugat, tidak dikenal.
 - e. Persekutuan hukum tidak boleh memindah tangankan haknya (*vervreemden* ; menjual, menukarkan, memberikan) untuk selamanya kepada siapapun juga.
 - f. Persekutuan hukum mempunyai hak percampuran tangan juga terhadap tanah-tanah yang telah digarap, seperti dalam pembagian pekarangan, dan jual beli tanah dan lain sebagainya.

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas maka masyarakat hukum adat mempunyai suatu kewenangan terhadap tanah-tanah yang ada di dalam lingkungan dan pada persekutuan tersebut. Wewenang mana berpokok pangkal pada suatu hak penguasaan berdasarkan hak mana masyarakat hukum adat dapat mengelola tanah-tanah tersebut untuk kepentingan bersama. Dalam hubungan ini setiap warga masyarakat yang ingin mendapatkan manfaat atas sebidang tanah yang ada di dalam persekutuan harus dengan sepengetahuan dan seizin dan pada kepala masyarakat hukum adat setempat.

Di Sulawesi Utara (khususnya di Kabupaten Minahasa) terdapat hamparan tanah adat yang dikenal sebagai tanah *kalakeran*. Tanah *kalakeran* tersebut pada kenyataannya masih ada. Dalam perkembangan sekarang, dengan meningkatnya kebutuhan dan terbatasnya persediaan tanah untuk pembangunan, menyebabkan tanah *kalakeran* sebagai tanah

adat mendapat perhatian sebagai salah satu alternatif pengadaan lahan pembangunan, walaupun sebenarnya berbicara mengenai masalah tanah "*kalakeran*" di Minahasa yang sejak bertahun-tahun tersebut adalah masalah yang rumit.

Namun penyelesaian yang wajar terhadap masalah ini dapat meningkatkan produksi pangan dan memperbaiki gizi masyarakat. Masalah tanah "*kalakeran*" di Minahasa ini berada di bidang hukum adat dan mempunyai hubungan langsung dengan hukum waris.

Analisa tentang tanah *kalakeran* di Minahasa masih memerlukan pendalaman yang serius. Lembaga hukum adat di Minahasa ini masih memerlukan penelitian yang lebih baik dan mendalam.

Di Sulawesi Utara (khususnya di Kabupaten Minahasa) belum ada peraturan yang secara khusus mengatur pemanfaatan tanah *kalakeran* sebagai tanah adat, khususnya yang akan diperuntukan bagi pembangunan.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Persoalan tanah *kalakeran* merupakan masalah dasar dan pokok yang melatar belakangi penulisan tesis ini, terutama jika tanah *kalakeran* keluarga/turunan dan tanah *kalakeran* desa/negeri ini akan dimanfaatkan untuk pembangunan baik oleh pihak pemerintah maupun swasta.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan disoroti dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah keluarga memanfaatkan tanah adat *kalakeran* untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari ?
2. Kendala apa yang dihadapi bila tanah *kalakeran* di Desa Taraitak Kecamatan Langowan digunakan untuk pembangunan ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan diadakannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami pemanfaatan tanah *kalakeran* yang merupakan tanah adat di Desa Taraitak Kecamatan Langowan oleh keluarga setempat.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala dan sikap masyarakat Desa Taraitak Kecamatan Langowan terhadap pemanfaatan tanah *kalakeran* bagi pembangunan.

1.4. KONTRIBUSI PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan kajian dalam upaya penyempurnaan status hak atau kepemilikan antara UUPA di satu sisi dengan hukum adat di sisi lain, khususnya terhadap pemanfaatan tanah adat tanah *kalakeran* yang merupakan tanah keluarga/turunan. Di samping itu diharapkan penulis dapat memberikan alternatif dan sumbangan pemikiran secara yuridis terhadap pemanfaatan tanah adat

dalam kegiatan pembangunan di daerah maupun kegiatan pembangunan nasional.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini untuk mempermudah memahaminya, penulis menyusunnya secara sistematis dalam 5 (lima) BAB yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN yang berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kontribusi Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA berisi Tinjauan Kepustakaan berupa teori-teori atau pendapat-pendapat para ahli yang berhubungan dengan permasalahan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN yang berisi metode-metode yang digunakan dalam melakukan penulisan tesis ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi mengenai jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam BAB I dengan menggunakan acuan pada BAB II.

BAB V : PENUTUP yang berisi Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. HAK ULAYAT DI INDONESIA

2.1.1. Pengertian Hak Ulayat

Uraian mengenai hak ulayat terlebih dahulu dapat dilihat dari istilah teknik terhadap hak persekutuan yaitu istilah *beschikkingsrecht*, sedangkan tanah yang merupakan wilayahnya dinamakan *beschikkingskring*. Istilah ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan hak ulayat, hak pertuanan atau hak purba.

Berkaitan dengan hak ulayat tersebut, Boedi Harsono menyatakan bahwa :

“Hak ulayat sebenarnya merupakan serangkaian dari pada wewenang-wewenang dan kewajiban-kewajiban suatu masyarakat hukum Adat termasuk lingkungan wilayahnya. Hak ulayat berlaku terhadap semua tanah wilayah itu, baik yang sudah dihaki seseorang maupun yang tidak atau belum dihaki.”⁹

Selain pendapat di atas Djaren Saragih menyatakan bahwa :

“Hak ulayat adalah hak dan kewajiban daripada persekutuan hukum sebagai suatu keseluruhan atas suatu wilayah tertentu, yakni wilayah di mana mereka hidup.”¹⁰

⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1999, hal. 162-164.

¹⁰ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1984, hal. 75.

Sedangkan menurut Masen dan Hens dalam E. Ruchiyat, menyatakan bahwa hak ulayat adalah :

“Hak desa menurut adat dan kemauannya untuk menguasai tanah dalam lingkungan daerahnya buat kepentingan anggota-anggotanya atau untuk kepentingan orang lain (orang asing) dengan membayar kerugian pada desa, dalam hal mana desa itu sedikit banyak turut bertanggung jawab terhadap perkara-perkara yang terjadi di situ yang belum dapat diselesaikan.”¹¹

Iman Sudiyat menggunakan istilah hak ulayat dengan hak purba adalah hak dipunyai oleh suatu suku (*clan/gens/stam*), sebuah serikat desa-desa (*dorpenbond*) atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya.¹²

Soerojo menyatakan bahwa hak ulayat dalam bentuk dasarnya adalah suatu hak persekutuan atas tanah yang didiaminya, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh persekutuan itu sendiri atau kepala persekutuan atas nama persekutuan.¹³

Sedangkan Mertokusumo et. al mengatakan bahwa hak ulayat adalah :

“Hak atas tanah yang menjadi milik bersama masyarakat, yang merupakan hak tertinggi kedudukannya. Hak ulayat mengandung dua unsur, kepunyaan artinya semua anggota masyarakat mempunyai hak untuk menggunakan dan unsur kewenangan, yaitu untuk mengatur, merencanakan dan memimpin penggunaannya. Kemudian karena semua anggota masyarakat tidak mungkin melaksanakan pengurusan hak ulayat, maka tugas tersebut dilimpahkan kepada kepala adat. Jadi pelimpahan itu, kepala adat

¹¹ E. Ruchiyat, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlangsungnya UUPA*, Alumni, Bandung, 1991, hal. 31.

¹² Iman Sudiyat, *Beberapa Masalah Mengusahakan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 2.

¹³ Soerojo, *Hukum Agraria*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hal. 133.

berhak memberikan hak-hak atas tanah kepada perseorangan seperti hak milik/hak yasan, hak pakai dan lain-lain.¹⁴

Van Vollenhoven dalam Djaren Saragih, mengatakan bahwa ada enam ciri khusus hak ulayat yang meliputi hak :

1. Persekutuan dan anggotanya berhak untuk memanfaatkan tanah, memungut hasil dari segala sesuatu yang ada di dalam tanah dan yang tumbuh dan hidup di atas tanah ulayat.
2. Hak individual diliputi oleh hak persekutuan. Mengenai hubungan antara hak persekutuan dan hak perseorangan terkenal pendapat dari Ter Haar yang disebut teori bola. Menurut teori ini hubungan antara hak persekutuan dan hak individu adalah bersifat timbal balik, yang berarti semakin kuat hak individual atas sebidang tanah, semakin lemah hak persekutuan atas tanah itu dan sebaliknya semakin lemah hak perseorangan atas sebidang tanah, semakin kuat hak persekutuan atas tanah tersebut.
3. Pimpinan persekutuan dapat menentukan untuk menyatakan dan menggunakan bidang-bidang tanah tertentu ditetapkan untuk kepentingan umum dan terhadap tanah ini tidak diperkenankan diletakkan hak perseorangan.
4. Orang asing yang mau menarik hasil dari tanah-tanah ulayat harus terlebih dahulu minta izin dari kepala persekutuan dan harus membayar uang pengakuan dan setelah panen harus membayar uang sewa.
5. Persekutuan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di atas lingkungan ulayat.
6. Larangan mengasingkan tanah, yang termasuk tanah ulayat artinya baik persekutuan maupun anggotanya tidak diperkenankan memutuskan secara mutlak sebidang tanah ulayat sehingga persekutuan sama sekali hilang kewenangannya atas tanah tersebut.¹⁵

2.1.2. Berlakunya Hak Ulayat

Di samping ciri-ciri tersebut di atas, hak ulayat mempunyai daya berlaku ke dalam dan ke luar, M. Isa dalam Thalib memberikan kesimpulan

¹⁴ Mertokusumo, et. al, *Pendaftaran Hak Atas Tanah Menurut UUPA*, Karunika, Jakarta, 1988, hal. 419.

¹⁵ Djaren Saragih, *Op.cit*, hal. 75-76.

sebagai berikut : fungsi kegiatan-kegiatan atau aktivitas hak ulayat atas tanah tampak adanya dua fungsi, yaitu fungsi ke dalam dan fungsi ke luar.¹⁶

1. Fungsi ke dalam daerah-daerah persekutuan hukum tempat penjelmaannya antara lain :

a. Anggota-anggota persekutuan hukum mempunyai hak tertentu atas obyek hak ulayat yaitu :

(1) Hak atas tanah : hak membuka tanah, hak memungut hasil, mendirikan tempat tinggal dan hak menggembala.

(2) Hak atas air : memakai air, menangkap ikan dan lain-lain.

(3) Hak atas hutan : hak berburu, hak-hak mengambil hasil hutan dan sebagainya. Hak-hak di atas dapat menimbulkan hak milik atas tanah atau atas hasil tanah itu.

b. Kembalinya hak ulayat atas tanah-tanah dalam hal pemiliknya pergi tak tentu rimbanya, meninggal tanpa waris atau tanda-tanda membuka tanah telah punah.

c. Persekutuan menyediakan tanah untuk keperluan persekutuan, umpamanya tanah perkuburan, tanah jawatan dan sebagainya.

d. Bantuan kepada persekutuan dalam hal transaksi tanah dalam hal ini dapat dikatakan kepala persekutuan dapat bertindak sebagai pengatur.

2. Fungsi ke luar daerah-daerah persekutuan hukum tampak penjelmaannya antara lain :

¹⁶ S. Thalib, *Hubungan Tanah Adat Dengan Hukum Agraria di Minangkabau*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 22.

- a. Melarang untuk membeli atau menerima gadai tanah terutama bila hak ulayat itu masih kuat.
- b. Untuk mendapat hak memungut hasil atas tanah memerlukan izin serta membayar *recognitie* atau *retribusi*.
- c. Tanggung jawab persekutuan atas reaksi adat, dalam hal terjadinya suatu delik dalam wilayahnya yang si pembuatnya tidak diketahui keberadaannya.¹⁷

Dalam hal fungsi keluar ini kepala persekutuan bertindak mewakili persekutuan itu.

Kedua fungsi hak ulayat tersebut di atas mengandung arti bahwa :

1. Fungsi ke dalam, dalam arti tanah dimaksud dapat dipakai setiap warga masyarakat daerah persekutuan guna kelangsungan hidupnya, misalnya tanah untuk perkampungan, pemakaman, sawah, berkebun, berburu dan sebagainya.
2. Fungsi ke luar, dalam arti tanah itu diperlukan untuk kepentingan bersama dalam masyarakat daerah persekutuan atau dalam negara/pemerintah, misalnya untuk sarana pendidikan, pemukiman, transmigrasi dan sebagainya.¹⁸

Di Kabupaten Minahasa, desa/negeri sebagai persekutuan hukum tidak hanya mempunyai hak ulayat Indonesia, tetapi di sini juga ada hak milik

¹⁷ *Ibid*, hal. 30.

¹⁸ *Ibid*, hal.36.

atas tanah (ulayat) dari persekutuan hidup yang sekarang masih dinamakan hak *kalakeran*.¹⁹

Batas-batas wilayah dari lingkungan hak ulayat pada semua lingkungan hukum, terdapat di mana lingkungan hak ulayat dari persekutuan hukum bertemu dengan lingkungan persekutuan lainnya. Batas yang samar-samar dan kabur sering terjadi sengketa perbatasan negeri-negeri yang bertetangga. Biasanya batas-batas itu dijaga oleh orang-orang yang ditugaskan untuk mencegah masuknya orang-orang luar. Penjaga-penjaga ini di Minahasa disebut *Taterusan*.²⁰

Dikaitkan dengan tanah *kalakeran* sebagai tanah adat di Kabupaten Minahasa, maka dapat dikatakan bahwa tanah *kalakeran* berada di bawah kekuasaan hak ulayat suatu desa/negeri. Dengan demikian masyarakat desa dapat menikmati tanah-tanah beserta segala hasilnya.

Tanah-tanah *kalakeran* desa/negeri biasanya penggunaannya diatur oleh kepala desa bersama-sama penduduk. Di Kabupaten Minahasa selain tanah *kalakeran* desa/distrik terdapat juga tanah *kalakeran* keluarga/famili yang pengaturannya adalah keluarga yang biasa disebut pengatur, tugas mereka menjaga tanah itu dan para anggota keluarga tidak mempunyai hak milik, tetapi hak pakai.

Dengan berlakunya hak ulayat ke dalam, maka tiap anggota persekutuan berhak untuk mengadakan hubungan hukum dengan tanah serta

¹⁹ L. Adam, *Pemerintahan di Minahasa*, Bhratara, Jakarta, 1975, hal. 33.

²⁰ *Ibid*, hal. 40.

dengan semua isi yang ada di atas tanah ulayat, apabila anggota-anggota ulayat mengadakan hubungan hukum dengan tanah ataupun isi dari tanah ulayat dengan demikian, anggota tersebut mempunyai hubungan tertentu dengan tanah ulayat. Hubungan tertentu ini dapat berupa hak-hak atas tanah kalau yang mengadakan hubungan tersebut adalah perorangan, maka timbullah hak perorangan atas tanah.

Iman Sudiyat menyatakan bahwa hak perorangan adalah suatu hak yang diberikan kepada desa ataupun orang luar atas sebidang tanah yang berada di wilayah hak purba persekutuan hukum yang bersangkutan.²¹

Berdasar uraian tersebut, Djaren Saragih menyatakan bahwa adapun jenis-jenis hak antara lain :

- (a) Hak milik atas tanah : Hak milik adalah hak ulayat di mana anggota tersebut mempunyai kekuasaan penuh untuk bertindak atas tanah ataupun isi dari lingkungan ulayat.
Hak milik terikat adalah hak milik yang dibatasi oleh hal lain misalnya : milik *komunal* atas tanah di mana sebidang tanah menjadi milik bersama dari penduduk desa. Hak milik ini di Bali di sebut *Druwe Desa*, di Manado disebut *Kintal Kalakeran*, di Minangkabau disebut *Harta Pusaka*. Apalagi hak milik bersama itu berupa sawah, di Jawa Barat disebut *Kannomesan* atau *Kasikepan*. Dalam *kasikepan* anggota-anggota ulayat yang ikut berhak atas sawah mempunyai hak pakai.²² Hak milik tidak terikat adalah hak milik dari perseorangan yang tidak ada campur tangan dari hak-hak desa. Sebagai anggota-anggotanya *kasikepan* dapat diwariskan. Tetapi hanya satu kali saja.
- (b) Hak menikmati hasil (*Genotrecht*), adalah hak yang diberikan pada seseorang untuk memungut hasil tanah yang tidak lebih dari satu kali panen.
- (c) Hak terdahulu (*Voorkeursrecht*), hak yang diberikan seseorang untuk mengusahakan tanah di mana orang tersebut didahulukan daripada orang-orang lain.

²¹ Iman Sudiyat, *Op-cit*, hal. 8.

²² Djaren Saragih, *Op-cit*, hal. 82.

- (d) Hak terdahulu untuk beli (*Naastingsrecht*), yaitu hak yang diberikan seseorang untuk membeli sebidang tanah dengan menge-sampingkan orang lain. Hak ini disebut hak wenang beli.
- (e) Hak memungut hasil karena jabatan (*Ambtelijkprofijtrecht*), yaitu hak atas tanah yang diberikan kepada pengurus masyarakat selama dia menjadi pengurus masyarakat. Tanahnya disebut tanah bengkok.
- (f) Hak pakai (*Gebruikrecht*), adalah hak atas tanah yang diberikan seseorang atau sekelompok orang untuk menggunakan tanah ataupun memungut hasil dari tanah tersebut misalnya : kerabat di Minangkabau mempunyai sawah yang disebut sawah pusaka. Sawah pusaka ini dibagi-bagikan kepada anggota-anggota kerabat dan diberikan hak pakai.
- (g) Hak gadai dan hak sewa (*Pand end huursrecht*), adalah hak yang timbul karena perjanjian-perjanjian atas tanah.²³

Hak perseorangan atas tanah diakui oleh hukum Adat secara individu maupun persekutuan/kelompok ahli waris, baik mencakup tanahnya maupun apa saja yang timbul dihasilkan oleh tanah itu.

Hak milik menurut R. Susanto adalah :

"hak penguasaan tanah dengan cara yang seluas-luasnya dan memungut hasil tanah itu dengan sepenuhnya, dengan mengindahkan peraturan pemerintah dan hukum Adat setempat. Unsur-unsur yang terpenting dari hak milik yaitu (1) menguasai tanah, artinya sebidang tanah disewakan, menghadiahkan, menjual tanah menurut kehendak pemilik, (2) memungut hasil."²⁴

Van Vollenhoven dalam Mahadi menyatakan bahwa :

"persekutuan hukum adalah tiang pertama sedangkan hak ulayat adalah tiang kedua. Tiang yang pertama persekutuan hukum mempunyai tempat yang sentral, karena pada dasarnya hak atas tanah ulayat dipegang oleh persekutuan hukum. Jadi hukum tanah ia memainkan peranan penting. Misalnya transaksi mengenai tanah dilakukan dengan membawa serta kehadiran kepala persekutuan."²⁵

²³ *Ibid*, hal. 84.

²⁴ R. Susanto, *Hukum Pertanahan (Agraria)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hal. 20.

²⁵ Mahadi, *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak Tahun 1854*, Alumni, Bandung, 1991, hal 58.

Di Indonesia hukum melindungi hak milik. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa ketentuan dari UUPA, yakni terdapat pada Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pasal 21 ayat (1), (2) dan (4) serta Pasal 22 ayat (1) dan (2).

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di Indonesia, tidak ada suatu alasan untuk menyebutkan sesuatu dengan nama "hukum" selain apa yang telah diputuskan sebagai "hukum" oleh pejabat-pejabat masyarakat yang bertugas menetapkan dalam keputusan-keputusannya bagaimana hukumnya.

Terhadap pertanyaan bilamanakah secara teoritis orang dapat menamakan Hukum Adat, yang berlaku (*geldend adat recht*) (berhadapan dengan adat) dan kaidah-kaidah hukum tak tertulis yang berlaku (*geldende ongeschreven rechts – normen*) (berhadapan dengan kaidah-kaidah tak tertulis macam lain) (*ongeschreven normen van anderen aard*). Keputusan-keputusan yang diambil oleh pendukung-pendukung kekuasaan, ialah penghulu-penghulu rakyat, keputusan-keputusan mana selalu dapat dan harus ditafsirkan tidak hanya sebagai keputusan yang konkrit, melainkan juga sebagai suatu kaidah untuk perkara-perkara yang "sama" (yaitu perkara-perkara yang mengandung kejadian-kejadian yang bersangkutan dengan itu, jadi perkara-perkara yang seberapa jauh sama) menunjukkan adanya kaidah-kaidah hukumnya yang berlaku dalam masyarakat; yaitu bentuk-bentuk hukum daripada nilai-nilai dan penilaian-penilaian masyarakat, bentuk-bentuk hukum mana timbul dari beraneka gejala-gejala hidup yang bebas. Tapi kaidah-kaidah hukum serupa itu tidak semua sama padatnya; bertambah dan berkurang padatnya itu tergantung dari : apakah disokongnya oleh soal

ada pertaliannya atau tiada pertaliannya secara sistem dengan kaidah-kaidah lainnya (karena sistemnya), apakah disokong oleh penghargaan baik atau kurang baik oleh kenyataan sosial (*sociale werkelijkheid*) dan oleh syarat-syarat perikemanusiaan, atau apakah disokong oleh keputusan-keputusan yang sama sejumlah besar atau sejumlah kecil, faktor-faktor mana kesemuanya dapat memperkuat atau memperlemah satu sama lain. Barang siapa yang bertugas memberi keputusan oleh karena itu harus benar-benar sadar akan tanggung jawabnya bahwa dia adalah unsur dalam hal pembentukan hukum. Karena fungsinya haruslah ia, dari sebab ia adalah pembesar masyarakat, memberi keputusan sedemikian rupa sehingga dapat disalurkan daripadanya : kaidah (keputusan yang ditafsirkan sebagai kaidah) yang menurut keyakinannya akan berlaku dalam lingkungan di mana ia mengadili itu, yaitu pertama-tama untuk perkara yang kongkrit itu, tapi juga untuk semua perkara-perkara lainnya yang seberapa jauh mengandung kejadian-kejadian yang sama dan yang bersangkutan (relevan) (dalam keadaan-keadaan sosial yang sama dan yang bersangkutan pula). Masing-masing pembesar yang bertugas memberi keputusan ialah masing-masing hakim, oleh karena itu harus memaklumi keputusan-keputusan yang dahulu dalam perkara-perkara yang sama, yang berkualitas istimewa karena tanggung jawab istimewa dari orang yang dahulu memberi keputusannya itu. Tambahan pula karena perkara itu oleh keputusan dan dalam keputusan selalu dilukiskan dengan tepat betul (*presiesering*) dan dirumuskan (*formulering*), maka dari itu akibatnya ialah, bahwa setiap keputusan memberi

sedikit banyak sumbangan pengertian terhadap apa yang harus “berlaku” (*gelden*). Jadi secara psikologis dan secara *functioneel* setiap keputusan mengakibatkan suatu daya pengaruh yang tertentu. Tapi juga hanya suatu daya pengaruh yang tertentu. Karena justru tanggung jawab terhadap masyarakat yang diberikan kepada hakim (atau pemegang kekuasaan lainnya) karena fungsi memutuskan itu, menyebabkan bahwa dia (untungnya karena ia tidak terikat *formeel* pada sesuatu keputusan yang dahulu atau “*precedent*”) dalam perkara-perkara yang sama baru boleh (tapi juga lantas harus) memperkuat keputusan-keputusan yang dahulu itu hanya bilamana keputusan itu ternyata dapat dipertahankan, yaitu dapat dipertahankan sesudahnya diujinya atas seluruh sistemnya Hukum Adat sebagaimana yang bersambung dengan kenyataan sosial (*sociale werkelijkheid*), sehingga Hukum Adat itu adalah perwujudan sendiri daripada kenyataan sosial itu, yang tak ada hentinya berubah-ubah dan yang dalam keputusan dahulu-dahulu mungkin mendapat tafsiran yang “salah,” selanjutnya diuji atas syarat-syarat perikemanusiaan yang harus dipenuhi bila hakim berkehendak memberi keputusan yang dia dapat mempertanggung-jawabkannya.

Prinsip dalam UUPA yang berkenaan dengan hukum Adat dapat dilihat dalam Pasal 5 UUPA yang isinya sebagai berikut :

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan Sosionalisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan

perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.²⁶

Selanjutnya terdapat dalam beberapa pasal UUPA yang menunjukkan hukum Adat sebagai dasarnya, yaitu :

Pasal 2 ayat (4) :

"hak menguasai negara tersebut di atas pelaksanaan dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum Adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah."²⁷

Pasal 3 :

"dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi."²⁸

Boedi Harsono menyatakan bahwa, perlu kita ketahui pula pidato jawaban pemerintah atas pandangan umum para anggota DPR-GR yang diucapkan oleh Menteri Agraria Mr. Sadjarwo di dalam Sidang DPR-GR tanggal 14 September 1960, antara lain menyebutkan :

"apa yang diterangkan oleh saudara Frans Seda tentang penghapusan swapraja-swapraja dan hak-hak wewenangnya atas tanah, yang tidak boleh mengakibatkan hilangnya hak-hak ulayat dan hak-hak adat lainnya, maka pemerintah ingin menegaskan bahwa hak ulayat yang

²⁶ *Ibid*, hal. 32.

²⁷ R. A. Rangemihardja, *Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982. hal. 231.

²⁸ *Ibid*, hal. 330.

diakui adalah hak ulayat yang nyata-nyata masih ada. Artinya yang sudah tidak ada tidak kita hidupkan kembali.²⁹

Selanjutnya A. P. Parlindungan, menyatakan bahwa :

"hukum Adat mengenai tanah yang kita kenal sekarang sebenarnya adalah hasil perkembangan yang tidak sedikit dipengaruhi oleh politik kolonial, sehingga dalam kenyataannya ada beberapa segi-segi hukum Adat itu secara diam-diam menghidupkan pertentangan-pertentangan di antara kita yang tidak sesuai dengan asas dan tujuan bangsa dan semenjak itulah perkembangan sikap bahwa hukum yang direstui seperti yang dikemukakan oleh Gouw Giok Siong atau hukum Adat yang disaner oleh Boedi Harsono dan sudah banyak digunakan istilah ini oleh para sarjana hukum."³⁰

Dengan pengertian Pasal 2 ayat (4), Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA dan pidato jawaban pemerintah atas pandangan umum para anggota DPR-GR tersebut, maka tanah *kalakeran* sebagai tanah Adat, masih diakui keberadaannya di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Minahasa, karena masih ada.³¹

2.1.3. Hubungan Timbal Balik Tanah Hak Ulayat Dengan Individu.

Hubungan hidup antara umat manusia yang teratur susunannya dan bertalian satu sama lain di satu pihak dan tanah di lain pihak yaitu tanah di mana mereka berdiam, tanah yang memberi makan mereka, tanah di mana mereka dimakamkan dan yang menjadi tempat kediaman orang-orang halus pelindungnya beserta arwah leluhurnya, tanah di mana meresap daya-daya hidup, termasuk juga hidupnya umat itu dan karenanya tergantung

²⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah)*, Djambatan, Jakarta, 2002, hal. 80.

³⁰ A. P. Palindungan, *Landerform di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987, hal. 59.

³¹ *Ibid*, hal. 60.

daripadanya, maka pertalian demikian itu yang dirasakan dan berakar dalam alam pikirannya “serba berpasangan” (*participerend denken*) itu dapat dan seharusnya dianggap sebagai pertalian hukum (*rechtsbetrekking*) umat manusia terhadap tanah.

2.1.3.1. Berlakunya ke dalam.

Masyarakat dalam arti kata anggota-anggotanya bersama, mempergunakan hak pertuanan (*beschikkingsrecht*) – nya dengan jalan memungut keuntungan dari tanah itu dan dari binatang-binatang dan tanaman-tanaman yang terdapat dengan tak terpelihara di situ. Masyarakat itu, dalam arti kata kesatuan daripada anggota-anggotanya, membatasi kebebasan berbuat daripada anggota-anggota perseorangan berdasarkan atas haknya atas tanah itu dan untuk kepentingannya sendiri (kepentingan masyarakat). Hubungan hak pertuanan terhadap hak-hak orang seorang adalah bertimbang balik dengan tiada hentinya. Besarnya perbedaan dipandang dari sudut nilai sosial, hak orang seorang terhadap hak masyarakat mengakibatkan sama besarnya kekuatannya hak masyarakat untuk mempertahankan diri terhadap hak orang seorang itu, demikian juga sebaliknya.

Bilamana hubungan perseorangan atas tanah itu berkurang atau bila hubungan itu diabaikan terus-menerus, maka pulihlah hak-haknya masyarakat dan “*beschikkingsrecht*” atas tanah itu berlaku kembali dengan tiada gangguannya. Di Minahasa pada pokoknya hak-hak perseorangan atas tanah yang terbuka itu bertahan selama-lamanya sampai abadi, di sana tidak

ada pencabutan kembali secara pelan-pelan atau cepat daripada tanah-tanah yang ditinggalkan, untuk kepentingan "*beschikkingsrecht*" yang utuh tetapi sebaliknya dalam lingkungan hukum itu masyarakat ada kekuasaan (berdasarkan atas "*beschikkingsrecht*") untuk memberikan hak-hak sementara (hak-hak pakai) kepada sesama anggota atas tanah "hak miliknya" kepada lain orang.

Di beberapa lingkungan hukum, maka kesadaran mengenai adanya hubungan masyarakat dengan tanah itu terbukti dari adanya selamatan-selamatan pada waktu yang tetap di tempat-tempat selamatan dusun di bawah pimpinan penghulu-penghulu masyarakat pada permulaan mengerjakan tanah, sedangkan keyakinan dari adanya pertalian hidup antara umat dan tanah juga kentara di waktu pesta-pesta pembersihan dusun sesudah panen dan di waktu upacara-upacara sebagai itu.

Anggota-anggota masyarakat yang sebagai perseorangan memungut hasil dari tanah itu, dalam kebanyakan lingkungan hukum pada pokoknya selama penggarapan tanah itu semata-mata diperuntukkan buat nafkahnya masih diakui bahwa mereka mempergunakan hak masyarakat, keluarganya atau kerabatnya sendiri. Bila anggota-anggota itu melewati batas (misalnya menggarap tanah itu untuk maksud perdagangan), maka mereka diperlakukan seberapa jauh sebagai orang-orang luaran masyarakat dan hak masyarakat "ke luar" berlaku terhadap mereka itu (seberapa jauh).

Sebagai (sesama) pendukung hak masyarakat, maka anggota itu mempunyai hak untuk berburu dan mengumpulkan hasil hutan untuk dipakai

sendiri dan dengan demikian ia memperoleh hak milik atas apa yang diperolehnya, selanjutnya ia ada hak mengambil buat dimilikinya pohon-pohon yang tumbuh sendiri di hutan-hutan itu. Perbuatan sedemikian itu menimbulkan pertalian perseorangan dalam hukum antara anggota dan pohon itu dan meskipun perbuatan tadi dijalankannya berdasar atas keanggotaannya dari pada masyarakat pemilik "*beschikkingsrecht*" itu, namun pertalian hukum secara perseorangan yang telah ditimbulkan itu selanjutnya menempatkan si anggota itu sedikit banyak berhadapan dengan masyarakat itu. Pertalian pribadi itu diselenggarakan setelah si anggota itu mengadakan pujaan dan menempelkan sesuatu tanda, yaitu tanda larangan dan tanda milik, dalam pada itu misalnya juga dipanjangnya pasak-pasak untuk dapat dipanjatnya pohon itu atau ditebangnya tanaman-tanaman sekitar pohon itu supaya menjadi bersih. Sejak itu maka pohon itu buat sementara dilepaskan dari kekuasaan anggota-anggota lainnya untuk dipungut hasilnya, namun hak masyarakat itu masih tetap meliputi hak pribadi, sebagaimana perseorangan diliputi oleh umat seluruhnya. Bila tanda-tanda itu menjadi tidak kentara lagi karena kulit pohon atau cabang-cabang itu bertumbuh kembali, maka hak masyarakat berpulih kembali sepenuhnya pula dengan menghapuskan hak perseorangan itu, maka masing-masing anggota dapat lagi memiliki pohon itu menurut hukum.

Akhirnya anggota masyarakat itu ada hak membuka tanah (*ontginningsrecht*), di mana ia dapat menyelenggarakan hubungan sendiri terhadap sebidang tanah sebagai sebagian dari lingkungan hak pertuanan

("beschikkingsrecht"). Hak membuka tanah itu menurut hukum Adat adalah hanya satu daripada tanda-tanda lahir daripada "beschikkingsrecht" dan hanya ada pada anggota-anggota masyarakat atas tanah-tanah di lingkungan hak pertuanan sendiri (walaupun pada pokoknya hak membuka tanah itu dapat diperoleh oleh orang-orang luaran setiap satu panen). Bila pembukaan tanah itu dilaksanakan di bawah pimpinan penghulu-penghulu bersama-sama dan mereka yang membagi-bagikannya menjadi tanah-tanah pertanian perseorangan, kemudian di tahun berikutnya lagi terjadi demikian, sedang bagian yang ditinggalkan itu telah tertutup oleh semak-semak, maka di situ hubungan perseorangan adalah tidak berapa lama dan lemah, sedangkan pertalian masyarakat yang meliputinya adalah kuat. Bila si anggota sendiri memilih sebidang tanah hutan dan di sana menaruhkan tandanya dengan setahunya penghulu dan di sana mengadakan pujaan pula, maka dengan demikian ia telah melaksanakan pertalian hukum dalam lingkungan ketertiban masyarakat; hal itu berarti, bahwa di antara anggota-anggota hanya dialah yang berhak mengerjakan tanah itu sebagai tanah pertanian, yaitu tanah pertanian buat dia sekeluarga, asal selalu dikerjakannya penebangan, pembakaran dan penanaman; jikalau dia melewatkan musimnya yang tertentu maka dapatlah ia oleh anggota lainnya dipaksa memilih (berdasarkan "beschikkingsrecht") di antara "terus mengerjakan tanah itu untuk diri sendiri" atau "menyerahkannya kepada orang lain". Dengan perkataan lain ia sementara hanya mempunyai hak terdahulu (*voorkeursrecht*) atas tanah itu. Bila ia meneruskan pekerjaannya membuka dan menanami tanah itu sampai

selesai, maka ia sebagai perkecualian menurut hukum hanya mempunyai hak perseorangan selama satu tanaman sampai panennya, jadi ia hanya mempunyai hak menikmati (*genotrecht*).

Tanah-tanah pertanian dan halaman-halaman rumah dapat diwariskan dan pemiliknya pribumi kebanyakan dapat menjualnya dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Apakah ia dapat menjualnya kepada orang-orang di luar daerahnya, hal ini tergantung dari apakah "*beschikkingsrecht*" dalam berlakunya ke luar tetap menolaknya atau sudah tak berdaya lagi akan menolaknya. Mungkin juga yang tinggal hanya hak terdahulu untuk beli (tanah tetangga) (*naastingsrecht*) untuk sesama anggota, yang untuk mencegah jangan sampai orang asing membeli tanah tetangganya itu, berhak ia membelinya sendiri seharga sama dengan tawaran si asing.

Ke dalam, maka "*beschikkingsrecht*" itu juga berlaku karena bagian-bagian tertentu daripada daerah sendiri dipakai buat tanah tempat kediaman umum atau buat keperluan-keperluan masyarakat sebagai kesatuan (pekuburan, cadangan kayu untuk pertukangan, penggembalaan umum, tanah-tanah arajang di Sulawesi Selatan, tanah "bengkok" di Jawa atau karena dipergunakan untuk dipungut hasilnya buat masyarakat sebagai kesatuan (sawah buat kas desa, suksara, titisara, kolam perikanan yang diborongkan untuk mengisi kas marga di Palembang, kas dusun *negory* di Ambon) dan oleh karenanya tertutup untuk dipetik hasilnya oleh sesama anggota. Pencadangan ini dapat diselenggarakan dengan jalan melarang memotong dan memetik; pula larangan memetik buat sementara (*sasi* di

Ambon) atau larangan mengambil ikan buat sementara (di kalangan orang-orang Toraja) adalah termasuk aturan-aturan pencadangan itu.

Berlakunya "*beschikkingsrecht*" ke dalam seluruhnya ada di bawah pengawasan daripada penghulu-penghulu rakyat, kadang-kadang juga daripada wali-wali tanah (*grondvoogden*) tersendiri.

2.1.3.2. Berlakunya ke luar.

Hak pertuanan atau "*beschikkingsrecht*" itu ternyata berlaku keluar karena orang-orang luaran masyarakat, orang-orang dari lain-lain tempat termasuk juga orang-orang dari masyarakat tetangga, hanya boleh memungut hasil dari tanah selingkungan "*beschikkingsrecht*" sesudah mendapat ijin untuk itu dari pihak masyarakat pula, sesudah membayar uang pengakuan di muka beserta uang penggantian di belakang, di situ si asing tadi pada pokoknya tak dapat memperoleh hak orang seorang atas tanah lebih lama daripada tempo untuk menikmatinya, ialah satu panen (*genotrecht*) pula ternyata berlakunya hak pertuanan ke luar itu ialah bahwa orang-orang luaran tak boleh mewaris, membeli atau membeli gadai tanah-tanah pertanian, pula bahwa mereka malahan menurut hukum Adat dapat dilarang dibatasi dengan perjanjian-perjanjian untuk menginjak daerah lingkungan "*beschikkingsrecht*" itu (ini terlepas dari soal mungkin atau tidaknya demikian itu menurut ketatanegaraan pada sekarang ini).

Dengan demikian untuk berlakunya keluar, maka **pertama** mereka yang datang dari luar harus berhubungan dengan penghulu-penghulu rakyat untuk mendapat izin. Permohonan izin itu menurut cara Indonesia patutnya

disertai dengan sekedar pemberian untuk membuka jalan ke arah jawaban yang baik. Selanjutnya **kedua**, di beberapa lingkungan hukum terdapat tanda yang kelihatan sebagai pendahuluan, *wang pemasuqan* (Aceh), *mesi* (Jawa), *uang paksa* (Minahasa), dibayarkan pada permulaan mempergunakan tanah oleh si asing, yaitu suatu tanda daripada kenyataan bahwa ia dengan kesadarannya mendatangi tanah milik orang lain untuk memungut hasilnya. Mereka yang bukan golongan marga yang "meraja" (*heersende marga*) misalnya di Angkola, dapat memperoleh izin mendirikan dusun dalam daerah *beschikkingsrecht*nya suatu *kuria*, (dusun itu lantas disebut; *huta na ro*), penghulunya (si pembangun dusun, *raja sioban ripe*) harus membayar dengan enam ekor kerbau, yang diperuntukkan buat masyarakat seluruhnya di induk dusun dan dusun-dusun lainnya, yang merupakan se *kuria* dan karena demikianlah maka di Bali seluruh penduduk padukuhan imigran-imigran Kastala (termasuk juga pegawai-pegawai raja yang dipekerjakan buat sementara di sana) di tanah Tenganan (Bali) tak lain dan tak bukan hanya pamaroh-pamaroh (*deelbouwers*) atas tanah-tanah pertaniannya orang-orang Tenganan. **Ketiga** adalah kebiasaan umum pemungutan biaya di belakang, juga dengan akibat, bahwa dengan demikian diakui telah memungut hasil dari tanah orang lain (maka dari itu bolehlah kadang-kadang jumlah pembayaran senyatanya kalau perlu amat sedikitnya, asal ada pembayaran apa-apa saja) sepuluh satu (10 %) sewa bumi, bunga kayu dan sebagainya. Di Minangkabau maka amsal adat "lembaga dituang, adat diisi" kadang-kadang ditafsirkan, bahwa pajak dan biaya dibayar oleh orang-orang luaran

masyarakat. Bukannya penghulu-penghulu saja mendapat bagian dari pemungutan-pemungutan itu, melainkan juga orang-orang banyak yang berhak atas tanah itu, seperti *paung asal*, yaitu golongan inti di dusun-dusun campuran di tepi sungai Barito (Kalimantan).

Terhadap orang-orang itu, maka masyarakat dengan sadarnya tetap memegang haknya atas tanahnya, orang-orang luaran itu tak dapat mendesak kembali hak itu, mereka tak dapat berakar dalam tanah itu, mereka tetap duduk kendur-kendur di atasnya (orang menumpang berhadapan dengan orang asal). Hanya bila dan di mana orang-orang "luaran asli" itu sepanjang masa, turun-temurun, menetap di masyarakat, maka mereka (sebagai suatu bagian dari proses jalannya orang luaran menjadi anggota berdasarkan atas lamanya ia menetap, memperoleh pemakaian tanah sedemikian itu pada saat-saat genting juga tak dapat dipertahankan terhadap haknya masyarakat, karena itu adalah tetap "pemakaian oleh orang asing (bila meninggalkan masyarakat, bila ada kecenderungan akan menjual tanah itu). Berhubung dengan itu, maka terdapatlah keadaan, bahwa kadang-kadang dalam dusun-dusun atau kesatuan-kesatuan wilayah anak cucu daripada pembentuk atau pembentuk-pembentuk dusun merupakan suatu golongan inti, yang hanya dapat hak sebulat-bulatnya atas tanah, sedang sesama anggota wilayah lainnya tentang itu hanya menempati kedudukan yang berkurang, walaupun mereka tak dapat disebut orang-orang luaran lagi.

Demikian dapat dimengerti pertimbangan kedudukan mengenai tanah antara marga tanah (*heersende marga*) terhadap penumpang-penumpangannya

di Batak; penumpang-penumpang yang menjadi sanak saudara karena perkawinan dan yang datang dari lain-lain daerah dapat (lambat-laun) di sana suatu hak milik yasan atas tanah tertentu, yang dihadiahkan karena perkawinan anaknya perempuan, walaupun kedudukannya mengenai hak atas tanah mula-mula lemah.

Dalam lebih dari satu lingkungan hukum terdapat, bahwa masyarakat-masyarakat itu dengan cara perjanjian bertimbal-balik menghapuskan kedudukannya "asing terhadap satu sama lain (*voor elkaar vreemden zijn*) (misalnya berhubung dengan suatu pertalian perkawinan di antara penghulu-penghulunya), maka oleh karena itu aturan-aturan pembukaan tanah baru dan pengumpulan hasil-hasil hutan didasarkan atas berlakunya "*beschikkingsrecht*" ke dalam, bukannya atas berlakunya ke luar.

Bertanggung jawablah masyarakat yang mempunyai "*beschikkingsrecht*" itu terhadap reaksi adat mengenai pelanggaran atau kejahatan yang terjadi di daerah "*beschikkingsrecht*" nya dan yang diperbuat oleh seseorang yang tak dikenal, ini dapatlah disebut sudut yang tak menguntungkan daripada "*beschikkingsrecht*" dalam berlakunya keluar.

Pertanggungan jawab tadi berdasarkan atas hubungannya dengan tanah dan ini ternyata dari hal-hal yang telah kejadian di mana orang-orang dapat melepaskan diri dari pertanggunganjawabnya dengan jalan menyerahkannya sebagian tanah lingkungan "*beschikkingsrecht*," di mana mayat si terbunuh diketemukan orang teranglah, bahwa di satu pihak pertanggungan jawab itu berdasarkan atas alam pikiran "serba berpasangan"

(*participerend denken*) dan di lain pihak timbul dari suatu siasat licin yang dipandang perlu dari pihak raja-raja atau pihak kekuasaan gubernemen.

Bilamana pertanggungungan jawab tadi hanya berdasarkan atas maksud terakhir ini, maka sifatnya sudah berubah. Di samping pertanggungungan jawab tadi adalah pertanggungungan jawab lain yang lain pula dasarnya, ialah pertanggungungan jawab daripada segolongan sanak saudara terhadap seorang daripada anggota-anggotanya. Pada lahirnya mungkin kedua macam pertanggungungan jawab itu luluh menjadi satu nampaknya, bilamana satu golongan sanak saudara sebagai masyarakat hukum mendiami teritor sendiri, namun kedua lembaga yang berbeda mutlak satu sama lain ini dalam hukum Adat tetap tampak berdampingan.

2.1.3.3. Benda (obyek) daripada "*Beschikingsrecht*."

Hak pertuanan berlaku baik atas tanah, maupun atas perairan (sungai-sungai, perairan pantai laut) dan juga atas tanaman yang tumbuh sendiri (pohon-pohon lebah, pohon-pohon buah-buahan, pohon-pohon untuk pertukangan) beserta atas binatang-binatang yang hidup liar. Karena berbagai keadaan maka berlakunya "*beschikingsrecht*" dalam lingkungan "*beschikingsrecht*" yang tertentu dapat sangat berbeda-beda. Di Jawa "*beschikingsrecht*" itu, mungkin hanya sebagai perkecualian, dapat ternyata terhadap tanah yang belum terbuka (hutan-hutan), terhadap dasar-dasar sungai yang menjadi kering, pulau-pulau yang timbul dan lain-lainnya, terhadap tanah yang dipungutnya dari perairan, maka "*beschikingsrecht*" itu sebagaimana di seluruh nusantara selalu berlaku dengan tertibnya terhadap

pembawaan lumpur-lumpur (*aanslibbing*) pada tanah pertanian, maka biasanya diakui juga haknya terdahulu (*voorkeursrecht*) si pemilik tanah pertanian itu atasnya. Pula berlakunya "*beschikkingsrecht*" atas tanah yang sudah dikerjakan itu tidak selalu sama. Dalam pelbagai lingkungan-lingkungan hukum (misalnya di Tapanuli Selatan, Ambon, Bali, Jawa) dapatlah orang membeda-bedakan tingkatan dalam kehebatannya, di beberapa dusun. **Pertama** : hak masyarakat itu paling kuat atas tanah-tanah yang sebagai tak bertuan jatuh kembali kepada dusun dan lantas oleh dusun itu dibagikan lagi kepada pemilik baru angkatan dusun itu sendiri, pertaliannya hukum perseorangan atas tanah itu buat sementara itu mengizinkan ia membuat perjanjian suatu apa mengenai tanah itu dan kedudukannya lemah sekali terhadap tindakan dari pihak kekuasaan dusun, misalnya bila tanah itu diambil kembali karena pekerjaan dinas dilalaikan. **Kedua** : "*beschikkingsrecht*" itu berlakunya juga mendalam atas tanah yang menjadi milik inti daripada anggota-anggota dusun, selama seorang keturunan (anak lelaki) memiliki tanahnya leluhur-leluhurnya, maka pertalian hukum perseorangan daripada penduduk inti dusun dalam lingkungan dusun itu memang kokoh, tapi kepentingan dusun menjaga jangan sampai ada perubahan dalam kedudukan hukum tanah-tanah inti itu, pula jangan sampai tanah-tanah dikenakan perjanjian-perjanjian, jangan sampai dibagi-bagi di antara ahli waris, jangan sampai jatuh terkumpul di satu tangan, bilamana anggota inti dusun meninggal tanpa anak-cucu, maka dusun mengangkat pemilik baru atas tanah-tanah pertanian atau kebun-kebun (Ambon) yang

lama-kelamaan memperoleh kedudukan yang sama seperti pemilik-pemilik semula. **Ketiga** : di masyarakat sedemikian itu di samping tanah-tanah yang sudah dibagikan oleh dusun dan di samping tanah-tanah milik penduduk dusun, mungkin juga terdapat hak milik atas tanah-tanah pertanian atau atas kebun-kebun, terhadap mana hak masyarakat sudah terdesak lebih jauh lagi ke belakang, pemilik-pemilik ini dapat menggadaikan dan menjual tanah-tanahnya, jarang sekali tanah-tanah itu jatuh kembali kepada dusun dan tindakan-tindakan dusun terhadap tanah-tanah itu adalah jarang pula, di Jawa disebutnya sawah *yasen* (berhadapan dengan sawah *pekulen*, *gogolan*), di Ambon disebutnya *dusun pusaka* (berhadapan dengan *dati*) dan seterusnya.. Inilah berlakunya hak dusun yang lipat tiga atau lipat dua, hal mana kadang-kadang disebut dengan istilah (yang umumnya tidak tepat) "milik campuran" ("*gemengd bezit*").

Terhadap tanah pekarangan berlakunya hak masyarakat itu kadang-kadang juga berlainan dengan tanah-tanah pertanian dalam dusun yang sama, itupun karena dari pihak dusun lebih mudah dijalankan tindakan-tindakan untuk mencetak pekarangan baru daripada tindakan-tindakan untuk memiliki tanah-tanah pertanian baru.

Nama untuk "*beschikkingsrecht*", sendiri yang menunjukkan adanya suatu hubungan rupa-rupanya dalam bahasa Indonesia tidak atau jarang terdapat, namun buat lingkungan "*beschikkingsrecht*" (*beschikkingskring*) sendiri sebagai lingkungan di mana-mana praktis ada istilahnya, istilah itu adalah sebutan untuk lingkungan "*beschikkingsrecht*" baik sebagai milik

patuanan (Ambon), maupun sebagai daerah penghasil makanan *panyampeto* (Kalimantan) atau sebagai lapangan yang terpagar, *pawatasan* (Kalimantan), *wewengkon* (Jawa), *prabumian* (Bali), atau sebagai tanah terlarang buat lain orang, *tatabuan* (Bolaang Mongondow). Selanjutnya terdapat istilah-istilah seperti *torluk* (Angkola), *Limpo* (Sulawesi Selatan), *nuru* (Buru), *payar* (Bali), *paer* (Lombok), *ulayat* (Minangkabau). Selanjutnya "hak ulayat" ini bermaksud "*beschikkingsrecht*" sebagai hak subyektif dalam arti "*technisch adatrechtelijk*", tapi terbenturlah orang pada kenyataan, bahwa orang tak mengatakan hak ulayat *nagari*, melainkan "lingkungan" daripada *nagari*. Apakah perkataan-perkataan *golat* di Batak dan *edikio* di Enggano sudah betul disalin dengan "*beschikkingsrecht*" dalam arti subyektief, maka hal ini harus diselidiki lebih lanjut. Di samping apa yang tersebut tadi masih banyak lagi istilah-istilah untuk "*beschikkingsrecht*" itu.

Untuk dapat memahami struktur persekutuan hukum, maka perlu diketahui faktor-faktor apa yang merupakan dasar pengikat anggota-anggota kelompok. Secara teoritis pada dasarnya dapat kita bedakan dua faktor utama yang menjadi dasar ikatan yang memikat anggota-anggota persekutuan itu, faktor-faktor itu adalah *geneologis* (keturunan) dan faktor *territorial* (wilayah).³²

Berdasarkan dua faktor pengikat tersebut, Djaren Saragih, memberikan tiga tipe pokok utama persekutuan hukum, antara lain :

- (1) Persekutuan hukum *geneologis*, berdasarkan pada faktor keturunan. seseorang menjadi anggota dari persekutuan hukum tersebut adalah

³² Ter Haar Bzn, *Op.cit*, hal. 7-8.

berdasarkan keturunan dari anggota tersebut. Untuk menentukan apakah termasuk dalam prinsip garis keturunan yang sama, dalam hal ini ada tiga macam dasar pertalian keturunan, yaitu :

- a. Masyarakat *matrilineal* yaitu masyarakat di mana anggota-anggota menarik garis keturunan hanya dari pihak ibu.
 - b. Masyarakat *patrilineal* yaitu masyarakat di mana anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari pihak bapak.
 - c. Masyarakat *parental* yaitu masyarakat yang menarik keturunan dari pihak ayah dan ibu.
- (2) Persekutuan Hukum *Territorial*, kelompok di mana anggota-anggotanya merasa terikat satu dengan yang lainnya karena merasa dilahirkan dan menjalani kehidupan bersama di tempat yang sama. Persekutuan hukum *territorial* terdiri dari : persekutuan desa dan perserikatan desa-desa.
- (3) Dalam persekutuan hukum yang tersusun atas dasar *geneologis-territorial*, ini berarti seseorang yang menjadi anggota persekutuan hukum, ditentukan oleh keturunan dan juga ditentukan oleh wilayah, yaitu bertempat tinggal pada daerah yang sama.³³

Di Kabupaten Minahasa, apabila diperhatikan bentuk masyarakat hukum Adat yang ada agaknya berasal dari persekutuan hukum *territorial* (wilayah), persekutuan hukum *geneologis (patrilineal)* dan *territorial-geneologis*.

2.2. TANAH KALAKERAN DI MINAHASA

2.2.1. Pengertian *Kalakeran*

Istilah *kalakeran* berasal dari bahasa Belanda "*laker*" yang berarti banyak. Kemudian diberi awalan *ka* serta akhiran *an*. Menurut J.H. Carpentier Alting dalam L. Adam istilah ini terdapat di daerah-daerah Tonsea (sebagian besar bagian Utara Minahasa), Tombulu (bagian tengah dan barat) dan juga Tompaso (bagian tengah Minahasa). Pada beberapa daerah di Minahasa

³³ *Ibid*, hal. 67-72.

diketemukan istilah lain dengan arti yang sama seperti *ka-keli-an* dan *ta-doo-tow* (daerah Tonsawang), *pa-hage-an* dan *to-da ker-it* (daerah Bantik).³⁴

Menurut F. X. Kalangi istilah *ka-keli-an* ditemukan di dalam bukunya J.A.T. Schwarz berjudul : *Totemboanansch Nederlandsch Woordenboek Met Nederlandsch Totemboanansch Register*.³⁵ Menurut beliau istilah *ka-keli-an* berarti kebanyakan atau terlalu banyak.

Menurut ajaran bahasa Tombulu, maka penambahan awalan *ka* dan akhiran *an* pada kata asal "*laker*" memberi arti pada kata "*kalakeran*" untuk banyak orang atau bagi banyak orang dan secara luas berarti "kepunyaan banyak orang," atau "banyak orang yang berhak" atau "pemilikan secara komunal."

Jadi bentuk pemilikannya adalah komunal atau "*gemeenschappelijk*", istilah ini dapat dilawankan pada istilah "tanah pasini" (*individueel bezit*).

Di Minahasa, juga di daerah-daerah lain di Sulawesi Utara terdapat banyak benda yang dipunyai banyak orang. Misalnya satu gilingan padi (digerakkan oleh air), alat-alat pertanian, tanah pertanian, rumah dan lain sebagainya.

Istilah *kalakeran* nanti dimunculkan dalam membicarakan tentang tanah milik masyarakat, misalnya tanah yang dibeli masyarakat untuk dipakai guna kepentingannya sendiri.

³⁴ L. Adam, *Op.cit*, 1902, hal. 65.

³⁵ F.X. Kalangi, *Inventarisasi Tanah-tanah Kalakeran di Minahasa Dewasa ini*, Lembaga Penelitian Hukum dan Pengabdian Masyarakat FH. P.M UNSRAT, Manado, hal 1.

Pengertian tanah *kelakeran* tersebut, tidak lepas dari sub-etnik sub-etnik yang berkuasa di Minahasa yaitu Tombulu, Tonsea, Tontemboan dan Tolour. Dalam batas-batas wilayah antar sub-etnik tidak jelas, hanya bahasa atau dialek yang satu-satunya indikasi yang dapat dijadikan pegangan batas wilayah. Dalam pertumbuhan penduduk, salah satu faktor sub-etnik berpindah atau mencari pemukiman lain dan daerah perladangan baru. Biasanya mereka masuk ke wilayah sub-etnik lain. Hal ini kemudian menjadi sebab terjadinya pertentangan sosial. Pertentangan-pertentangan itu tidak saja antar keluarga tetapi juga antar sub-etnik. Hal ini menyebabkan pimpinan sub-etnik bersepakat untuk mengadakan *Nunuwuan* yakni musyawarah besar mengenai perdamaian dan keamanan sekaligus menetapkan wilayah kekuasaan masing-masing sub-etnik. Maka lahirlah kesepakatan Pinawetengan tentang pembagian wilayah. Tempat pertemuan ini sampai sekarang diberi nama *Watu Pinawetengan* (Batu Pinawetengan).

Dalam musyawarah pada waktu itu, ditetapkan batas-batas wilayah yang dikuasai adalah batas alam dengan menunjuk puncak-puncak gunung tertentu. Dalam penetapan batas wilayah yang berbahasa Tombulu menguasai dan menempati bagian wilayah (tengah dan barat laut) Minahasa, yang berbahasa Tonsea menguasai dan mendiami (utara dan timur laut) Minahasa, berbahasa Tontemboan menguasai bagian daerah (tengah dan tenggara) Minahasa dan berbahasa Tolour menguasai dan menempati (selatan) Minahasa.

Dengan adanya peristiwa *Watu Pinawetengan* (Batu Pinawetengan), maka lahir hukum pertama, wewenang dan hak yang paling mula orang Minahasa mendapat kuasa hak atas tanah.

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah bangsa Belanda datang di Minahasa dibentuk beberapa *walak* atau distrik, dalam usaha-usaha untuk memajukan distrik maka pemerintah Belanda mengusahakan kepada penduduk distrik membuka hutan bersama-sama untuk milik penduduk distrik. Tanah-tanah yang dapat dikelola/diusahakan oleh penduduk distrik untuk menanam kopi. Setelah bangsa Belanda kalah perang dan kembali ke tanah airnya, maka tanah yang ditinggalkan oleh bangsa Belanda, masyarakat Minahasa menyatakan tanah itu adalah tanah *kalakeran* distrik (milik bersama distrik).

Tanah *kalakeran* distrik adalah tanah-tanah hutan yang belum diolah dan tanah-tanah yang pernah diolah yang diperuntukkan bagi anggota penduduk distrik. Tetapi pada waktu lampau distrik terdiri dari beberapa desa maka dalam perluasan desa tanah *kalakeran* distrik diserahkan kepada desa-desa baru dan tanah itu disebut tanah *kalakeran* desa/negeri (tanah *kalakeran umbanua*). Di mana tiap-tiap orang dari suatu desa, berhak untuk memetik hasil hutan dan hasil kebun yang menjadi milik desa/negeri. Demikian pula mereka dapat berburuh dan menangkap ikan di semua danau dan sungai mengalir yang berada pada daerah desa/negeri tersebut.

Berbeda dengan *kalakeran* keluarga/turunan untuk mendapatkan tanah setiap keluarga atau turunan sebagai suatu kumpulan sanak saudara

membentuk kesatuan yang bertautan rapat dan merombak hutan serta kemudian dimilikinya, di samping itu juga tanah-tanah yang di dapat dari dotu mereka yang sudah beberapa keturunan tidak dibagi.

Dalam pemilikan bersama tanah-tanah desa/negeri, serta mengambil hasil hutan, seperti rotan, kayu, madu, merombak hutan, membuat tambak-tambak tempat pemeliharaan ikan dan menanam pohon rumbia haruslah sepengetahuan kepala Adat yang disebut *Tonaas Umbanua*.

Dalam kegiatan-kegiatan anggota persekutuan hukum desa/negeri tersebut, di mana tanah-tanah milik desa/negeri itu mempunyai pengaruh timbal balik terhadap ulayatnya dalam hubungan pertuanan (*bechikkingsrecht*) terhadap orang adalah menguncup dan mengembang, bertimbal balik dengan tiada hentinya.

Tanah *kalakeran* keluarga biasa untuk mendapatkannya setiap keluarga/famili sebagai suatu kumpulan sanak saudara membentuk kesatuan yang bertautan rapat dan merombak hutan yang kemudian mereka memiliki bersama seperti *rokrok* dan *omba*.

Rokrok adalah sebidang hutan yang didalamnya keluarga/famili sudah merobohkan banyak pohon-pohon besar, tetapi belum dijadikan kebun, tanah yang demikian tidak boleh dimasuki orang lain, sebab hak atas tanah itu sudah dimiliki yang menebang pohon.

Omba adalah hutan yang berbatasan dengan *rokrok* yang belum ditebang pohon-pohonnya, tetapi telah dikelilingi tanda-tanda bahwa hutan itu akan dirombak, maka hak keluarga yang memberikan tanda-tanda itu

dihormati oleh orang-orang lain. Menurut Adat Minahasa tanah-tanah di atas dimiliki sepanjang zaman.

Selanjutnya apabila anak-anak dan cucu-cucu tersebut telah menjadi besar dan dewasa, maka sebagian dari mereka keluar dari tempat tinggal keluarganya dan mencari sebidang hutan baru dan merombak hutan tersebut dijadikan tempat berkebun atau tanah garapan. Biasanya tiap anggota keluarga itu mempunyai sebidang tanah luas yang terletak di sekitar tempat dia berdiam atau tinggal. Tanah-tanah tersebut menurut Adat, tidak dibagi-bagi di antara anggota keluarga, karena tanah itu telah menjadi milik bersama.

Jadi pengertian tanah *kalakeran* adalah suatu areal lahan yang secara hukum Adat yang dimiliki banyak orang dan mereka mempertahankan keutuhannya hak atas tanah dalam keadaan yang belum atau tidak dibagi, sampai generasi anak cucu keturunan mereka.

Dengan berkembangnya masyarakat dan meningkatnya pendapatan, maka pada umumnya boleh dikatakan sangat sporadis malahan kalau ada perlu pencatatan lagi. Yang masih ada ialah pemilikan sebidang tanah oleh banyak orang.

2.2.2. Asal Mula Tanah *Kalakeran*

Dalam Buku *Adatrechtbundel* III disebutkan bahwa tanah *kalakeran* adalah tanah-tanah yang belum pernah di buka. Tanah-tanah ini diperuntukan bagi penduduk-penduduk anggota sesuatu distrik (dapat disamakan dengan kecamatan pada struktur pemerintahan di daerah pada waktu sekarang).³⁶

Pada waktu-waktu yang lampau terdapat perkumpulan-perkumpulan keluarga-keluarga yang telah menyatukan diri di dalam wadah "*walak*". "*Walak*" tersebut yang menetap di sesuatu daerah mempunyai "*tanah walak*" atau "*pakasaan*".³⁷

Di dalam *Adatrechtbundel* III diperoleh uraian bahwa tiap-tiap orang dari sesuatu *pakasaan* berhak memperoleh atau memetik hasil dari *ta'lun* maupun *Uuman*.³⁸ Ia dapat berburu, menangkap ikan di semua danau, sungai besar atau kecil yang mengalir.

Melewati tanah milik *pakasaan*, setiap anggota *pakasaan* dengan pengetahuan "*tua-tua*" dan kepala *pakasaan* dapat mengambil hasil hutan (rotan, kayu, madu dan lain-lain), merombak hutan untuk dijadikan kebun, membuat tambak-tambak pemeliharaan ikan dan menanam pohon rumbia di daerah rawa.³⁹

Kegiatan-kegiatan anggota *pakasaan* di atas tanah milik *pakasaan* mempunyai pengaruh timbal balik terhadap hak ulayat *pakasaan*, atau

³⁶ *Adatrechtbundel* III, hal. 186.

³⁷ L. Adam, *Op.cit*, hal. 356.

³⁸ *Adatrecht* Buku III, *Op. cit*, hal. 50.

³⁹ *Ibid*, hal. 50.

sebagaimana dijelaskan oleh Ter Haar bahwa "hubungan hak pertuanan (*beschikkingsrecht*) terhadap hak-hak orang-seorang adalah menguncup mengembang bertimbal balik dengan tiada hentinya.

J.J. Door meier dalam L. Adam pernah menulis "*In den Archipel*" Schetst *Kruyt den toestand als volgt : elke familie, verzameling van naaste bloedverwanten, vormde een eenheid, die zich nauw aaneensloot*".

Dan zoo'n familie ontgon een stuk boschland, en daarop bleven ze allen tijde rechten behouden.

*Verder : Werd de familie aan kinderen en kleinkinderen te groot, dan trokken so m migen hunner weg o m een stuk boschgrond te ontginnein, en op deze wijze nieuwe landerijen te krijgen. Ook heet het, elke familie bezat een uitgestrektheid gronds, deze lag gewoonlijk in de onmiddellijke nabijheid van de woning.*⁴⁰

Terjemahan bebas berbunyi sebagai berikut :

"*kruyt* menggambarkan keadaan Nusantara sebagai berikut : Setiap keluarga sebagai suatu kumpulan sanak saudara sedarah membentuk kesatuan yang bertautan rapat, keluarga sedemikian merombak sebidang hutan dan mereka mempunyai hak atasnya sepanjang zaman.

Selanjutnya bila mana anak dan cucu telah menjadi besar dan dewasa, maka sebagian dari mereka ke luar dari tempat tinggal keluarga untuk mengerjakan suatu bidang hutan baru yang dijadikannya tanah garapan. Setiap keluarga biasanya memiliki sebidang tanah luas yang terletak luas di sekitar tempat ia berdiam."

⁴⁰ L. Adam, *Op.cit*, hal. 242.

Kebiasaannya tanah-tanah tersebut tidak dibagi-bagi di antara anggota keluarga. Hak milik keluarga yang bersangkutan timbul karena perombakan hutan oleh keluarga itu.

Sehubungan dengan hal tersebut L. Adam mengatakan, bahwa "tanah yang telah di rombak buat dijadikan kebun menjadi milik tetap si perombak menurut adat setempat dan diakui oleh para ahli adat Minahasa."⁴¹

Dengan kata lain tanah *pakasaan* yang telah dirombak atau dikerjakan oleh seseorang dari salah satu keluarga memberikan *hak pasini* kepada yang merombaknya.

Apabila kemudian tanah tersebut tidak dibagikan kepada anak atau turun temurun tetapi tetap tinggal milik bersama untuk usaha bersama maka status tanah adalah *kalakeran*.

L. Adam juga menambah penjelasan sebagai berikut :

*"Familiegronden (tana' kalakeran oen taranak, bahasa Tombulu) treft men nog in groote uitgestrektheden over de geheele Minahasa aan. Daartoe heeft niet weining medegewerkt de bovengenoemde adat regel, dat de door ieder familielid ontgonnen grond na zijn dood aan de familie toeviel. En nog is dit gebruik op verre na niet verdwenen, Weliswaar valt de individueel bezeten grond alleen aan de kinderen, maar dezen denken niet aan verdeeling, vooral niet wanneer het nagelaten stuk niet al te groot is. Zoo onstaat dan grondbezit van eene fa milietak of staak."*⁴²

Dengan kata lain L. Adam telah menegaskan bahwa di Minahasa terdapat tanah-tanah luas yang berstatus tanah *kalakeran*. Sebidang tanah

⁴¹ *Ibid*, hal. 493.

⁴² *Ibid*, hal. 489.

yang sebelumnya dikerjakan oleh seorang anggota keluarga dan jatuh sesudah ia meninggal kepada hak keluarga akan menjadi tanah *kalakeran*.

Kebiasaan ini belum hilang malahan tanah-tanah yang tidak terlalu luas biasanya tidak dibagi, sehingga dengan demikian timbullah hak milik keluarga atas sebidang tanah.

Sehubungan dengan pemilikan tanah di Minahasa, G. A. Wilken dalam L. Adam mengemukakan bahwa : ⁴³

"Familiegronden of beter" pusaka gronden (tanah tulau, het woord tulau komt overeen met het Maleische pusaka) hebben hun ontstaan te danken aan de oude Alfoersche gewoonte, dat de nalatenschap niet onder de erfgena men verdeeld wordt, maar in haar geheel in het Generalisati menschappelijk bezit van de erfgena men blijft".

Jadi tanah pusaka atau tanah "*tulau*" (yang ditinggalkan oleh orang tua) tidak dibagi karena menjadi milik bersama para ahli waris.

Suatu maksud utama tanah *kalakeran* keluarga ialah bahwa tanah tersebut menjadi sumber penghidupan bagi anggota keluarga yang ditinggalkan. Jadi memang untuk mempertahankan kelangsungan hidup keluarga. Semua anggota keluarga mempunyai hak yang sama atas tanah-tanah milik keluarga.

Anggota keluarga tertua (nyatanya di Minahasa melewati suatu musyawarah) menunjuk setiap tahun bagian yang dikerjakan oleh seorang anggota atau mengatur urutan giliran untuk bercocok tanam.

Hukum adat ini sangat penting karena ia melarang sesuatu transaksi terhadap tanah *kalakeran* tanpa pengetahuan dan persetujuan semua

⁴³ *Ibid*, hal. 358.

anggota keluarga. Perlu dicatat di sini yang dimaksud ialah semua anggota keluarga yang sah menurut kelahiran yang sah pula.

Sedangkan untuk pengerjaan oleh orang lain, kebanyakan terjadi karena "sewa" dalam arti mengizinkan orang lain mengerjakan tanah yang bersangkutan dan mengharuskan membayar sejumlah uang dan setelah setiap pembayaran dilakukan persewaan berakhir atau dapat diakhiri. Karena itu "sewa" ini seharusnya berlangsung selama waktu giliran garapan anggota keluarga yang bersangkutan.

F.D. Holleman di dalam F.X. J. Kalangi menulis, bahwa sudah sejak lama pemerintah Hindia Belanda telah mendesak agar penduduk membagi-bagi tanah keluarga dalam arti luas. Tetapi penduduk belum insaf akan peraturan dan belum ada keinginan, juga keadaan ekonomi belum mendesak. Tagal tanah yang sudah dibagi malahan kembali pada status *kalakeran*.⁴⁴

Di dalam *Adatrechtbundel* III terdapatlah uraian bahwa di antara semua orang Minahasa sering berganti-ganti status atas sebidang tanah. Kali ini *kalakeran* dan kali lain pasini, begitu sepanjang masa.⁴⁵ Tanah yang sudah menjadi bagian warisan akan menjadi tanah *kalakeran* manakala si peninggal wafat dan tanah tidak terbagi, apabila yang meninggal tidak ada ahli waris.

Demikian pula pada umumnya asal mula tanah *kalakeran* di Minahasa. di kota Manado yang beberapa puluh tahun lampau adalah bagian dari Minahasa, maka terdapatlah tanah *kalakeran* yang terjadi karena pembelian

⁴⁴ F.X. J. Kalangi, *Op.cit*, hal. 101.

⁴⁵ *Adatrechtbundel* III, *Op-cit*, hal. 59-60.

tanggal 10 Januari 1679, di mana kepala-kepala *walak* Minahasa mengadakan suatu perjanjian dengan kompeni. Perjanjian itu dikenal sebagai "Manado – Contract".⁴⁶

Pada waktu itu kompeni mulai membangun benteng *Nieuw-Amsterdam* sehingga memerlukan bahan-bahan bangunan dari rakyat Minahasa (menyesal sekali bahwa benteng tersebut sebagai benda kuno telah dibongkar dan sekarang menjadi pasar).

Rakyat dari berbagai *walak* datang membawa kebutuhan bahan bangunan dan dikumpulkan di sekitar benteng tersebut. Lama kelamaan diperlukan tempat penimbunan bahan bangunan dan sekaligus tempat rakyat berteduh, karena itu *pakasaan/walak* mulai membeli tanah sejak tahun 1700 dari orang-orang Eropa. Karenanya pula *pakasaan* membayar uang "verponding" (pajak),⁴⁷ Brouwer pula menulis antara lain bahwa banyak *pakasaan* telah membeli tanah-tanah di Manado dan Amurang untuk rakyat dan *pakasaan* yang sering membawa bahan bangunan, hasil perkebunan malahan sering dipanggil oleh pihak Kompeni.

Seperti *pakasaan* Sonder, Tompasso dan Kawangkoan telah menjualnya kepada orang asing, sedangkan *pakasaan* lain masih memilikinya. Membaca tulisan seorang sejarawan Minahasa maka kota Manado dulu bernama Wenang, di dalam mana terdapat beberapa rumah keluarga besar yang dibangun tiang-tiang kayu sampai setinggi 4 meter.⁴⁸

⁴⁶ Taulu H.M. *Sejarah Kotamadya Manado II*, 1967, hal. 20.

⁴⁷ *Adatrechtbundel IX*, hal. 20.

⁴⁸ Taulu H.M., *Op.cit*, hal. 24 – 25.

Di tengah-tengah Wenang pada waktu itu sedang didirikan satu bangunan benteng. Di sekitar daerah itu terdapat puluhan *walak* yang telah menimbulkan bahan-bahan bangunan.

Setelah kampung Wenang dipindahkan semua *walak* membangun tempat tinggal dan tempat penimbunan bahan. Karena banyaknya orang yang turun dari gunung-gunung dengan membawa bahan, maka setiap *walak* membeli tanah (*tumuwar*). Inilah yang disebut tanah *kalakeran*.

Tanah-tanah *kalakeran* di daftar di dalam buku register-register atas nama rakyat *walak – pakasaan* yang bersangkutan.

Pada sekitar tahun 1914-1919 semasa Tiedeman menjabat sebagai Residen, maka telah diambil keputusan agar kepala-kepala *pakasaan* dalam hal ini kepala-kepala distrik akan dapat menjual tanah *kalakeran* kepada rakyat yang mendudukinya. Perbuatan ini sebenarnya sudah dilakukan oleh beberapa kepala distrik.

2.2.3. Berbagai Macam Tanah *Kalakeran*

Ada beberapa macam tanah *kalakeran*, yaitu :

1. *Tana' oen taranak* = tanah *kalakeran* keluarga yang dirombak atau dibeli oleh seorang kepala keluarga (*dotu* = Datuk) dan sampai turun temurunnya belum pernah dibagi-bagi.
2. *Tana 'kalakeran oem banoea* = tanah *kalakeran* negeri/kampung yang pada mulanya dirombak dan dikerjakan oleh sesuatu negeri, misalnya buat tanaman kopi (1830-1896).

3. *Tana' kalakeran oem balak* – tanah *kalakeran pakasaan* atau distrik, yang contohnya terdapat di Wenang dulu (sekarang Manado). Misalnya tanah *kalakeran* distrik Tomohon, Langoan, Kakas, Tondano dan lain-lain.

Mengenai *kalakeran negeri* Brouwer dalam L. Adam mengemukakan, bahwa :

*"de negorijen hebben slechts grondbezit (tanah kalakeran oem banoea) wanneer de negorij-genooten samen een stuk grond voor een zeker doeleinde ontgonnen, waardoor zij dan de beschikking over tuinen verkregen, terwijl ook de algemeene begraafplaatsen in de regel aan het dorp behooren, verder nog de negorij-wegen en openbare platseen."*⁴⁹

Ternyata bahwa bilamana anggota sesuatu negeri-desa-kampung membuka sebidang tanah untuk suatu keperluan maka tanah itu adalah tanah *kalakeran* negeri. Karena itu tanah pekuburan, jalan desa dan tempat umum lainnya (lapangan sepak bola, pasar dan lain sebagainya) adalah tanah *kalakeran* negeri.

Selanjutnya Brouwer dalam L. Adam menjelaskan adanya gedung-gedung sekolah, tempat-tempat jaga, ruang pertemuan/balai desa yang dibangun oleh *pakasaan* tapi kemudian diserahkan kepada desa, walaupun pada waktu-waktu belakangan desa sendiri yang mendirikan sekolah-sekolah bersama umat gereja yang mempergunakan sebagai tempat bertemu beribadah.⁵⁰

⁴⁹ L. Adam, *Op.cit*, hal. 15.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 57.

L. Adam menjelaskan bahwa dahulu distrik-distrik bukan hanya memiliki tanah-tanah *kalakeran* tetapi juga pasanggrahan atau rumah loji, kantor-kantor, penjara, pasar dan kuda-kuda yang dipakai oleh kepala-kepala distrik dan pegawai dan juga pakaian "kabasaran" (pakaian-pakaian untuk barisan berkuda) adalah milik *kalakeran*.⁵¹

Dengan demikian juga barang-barang tidak tetap menjadi benda *kalakeran* di samping barang pasini.⁵²

Bahwa pada masa kini terdapat pula "tanah jemaat" atau tanah sesuatu badan gerejani atau umat, yang biasanya terdiri dari sebidang kintal dan diperoleh karena pembelian. Adapun kebun-kebun gereja yang dipelihara oleh umat yang bersangkutan ataupun anak-anak sekolah dari gereja tersebut.

Demikianlah beberapa ungkapan tentang bermacam tanah *kalakeran* di Minahasa yang masih ada dan status tersebut malahan tetap berlangsung sampai kini dan mungkin seterusnya.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 409.

⁵² Mr. C. van Vollenhoven, "*Het Adatrecht van Ned. Indie*", deel I, hal. 347.

2.2.4. Pemanfaatan Tanah *Kalakeran* Menurut Hukum Adat

R. Kumaunang *et. al.* menyatakan dalam hasil penelitiannya, bahwa tanah *kalakeran* masih ada di Kabupaten Minahasa.⁵³

Sedangkan hasil penelitian Pengadilan Tinggi SULUT, di Sulawesi Utara khususnya di Kabupaten Minahasa masih terdapat hak-hak atas tanah yang antara lain meliputi :

1. Hak Pasini (hak perorangan), yaitu hak diperoleh atau dipunyai seseorang secara turun-temurun baik melalui ayah dan ibu, atau harta pendapatan bersama mereka atau karena suatu transaksi dengan pihak lain seperti jual beli, tukar-menukar (baik dengan tanah atau benda-benda lain), hibah ataupun karena *landreform* dan sebagainya.⁵⁴
2. Hak *Kalakeran* (hak milik bersama) yang terbagi atas :
 - a. Hak *kalakeran* distrik yaitu di mana sebidang tanah menjadi milik bersama dari penduduk distrik yang pengolahannya dilakukan oleh anggota distrik.
 - b. Hak *kalakeran* desa/negeri yaitu di mana sebidang tanah menjadi milik bersama penduduk desa, yang pengolahannya dilakukan oleh anggota masyarakat desa.
 - c. Hak *kalakeran* famili/keluarga yaitu di mana sebidang tanah menjadi milik bersama atau dapat dari budel, yang pengelolaannya dilakukan secara bergilir (hak gilir) di antara keluarga serumpun. Jangka waktu pengelolaan dari giliran seseorang ditetapkan secara musyawarah.
3. Hak tumoyo (hak garap) yaitu hak atas tanah yang diperoleh seseorang untuk menggarap tanah tersebut atas dasar perjanjian bagi hasil.⁵⁵
4. Hak kawin/nikah, dalam mana seseorang wanita memperoleh pasini atas sebidang tanah karena pembagian mertuanya pada saat melangsungkan pernikahan.
5. Hak gadai yaitu hak yang diperoleh seseorang atas tanah karena perjanjian gadai dengan pemiliknya.
6. Hak sewa yaitu hak atas tanah yang diperoleh seseorang karena transaksi sewa-menyewa. Bentuknya sama dengan hak gadai.
7. Hak *neiwehe* yaitu hak daerah ini orang mendapat hak-hak atas tanah selain tersebut di atas, juga keluarga serumpun berkenaan dengan orang itu memangku jabatan hukum tua (Kepala Desa).

⁵³ R. Kumaunang *et. al.* ***Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Sulawesi Utara***, Depdikbud, Jakarta, 1994, hal. 72.

⁵⁴ Anonim, ***Hukum Tanah di Sulawesi Utara***, Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara, 1992, Manado, hal. 1.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 12.

8. Hak hibah yaitu pasini yang diperoleh seseorang atas dasar pemberian.
9. Hak waris yaitu hak atas tanah yang diperoleh seseorang karena warisan.⁵⁶

Jika bentuk persekutuan hukum dihubungkan dengan hak atas tanah menurut hukum Adat, maka hak persekutuan atas tanah pada masyarakat *territorial* dan masyarakat *geneologis* adalah hak persekutuan *territorial* termasuk didalamnya tanah *kalakeran* distrik dan tanah *kalakeran* desa/keluarga.

L. Adam menyatakan untuk mengetahui apa itu tanah *kalakeran*, kita harus membedakan antara hak milik pribadi (*pasini*, *pakasaan*) dari hak milik bersama (*kalakeran* berasal dari kata *laker* dalam bahasa Tombulu berarti banyak).⁵⁷

Hal ini berarti bahwa hak persekutuan hukum atas tanah yang dikenal sebagai tanah *kalakeran* itu masih tetap eksis bersama-sama dengan hak perseorangan (individual) atas tanah, yang dikenal dengan istilah *pasini*. Tanah *kalakeran* distrik dan tanah *kalakeran* desa/negeri, karena kedudukan yang identik dengan hak ulayat tentu saja mengalami pergeseran kedudukan dengan diundangkannya UUPA.

⁵⁶ *Ibid*, hal. 14.

⁵⁷ L. Adam, *Adat Istiadat Suku Bangsa Minahasa*, Bharatara, Jakarta, 1976, hal. 90.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.⁵⁸

Dalam metode penelitian ilmu hukum yang merupakan bidang kajian dalam penulisan tesis ini, diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil postulat dan proporsi-proporsi yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif-alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting di dalam rangkaian penelitian hukum.

3.1. METODE PENDEKATAN

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, di mana lebih ditekankan pada kenyataan-kenyataan atas permasalahan yang ada dan berkembang dalam masyarakat yang bersumber pada data primer, serta ditunjang juga oleh norma-norma, baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis.

⁵⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hal. 42.

3.2. SUMBER DATA

Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan untuk memperoleh data yang diharapkan dan untuk dapat dipertanggungjawabkan, sumber data diperoleh melalui :

3.2.1. Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari sejumlah Undang-undang, Peraturan-peraturan, literatur, pendapat para ahli dan tulisan lainnya yang berhubungan dengan penulisan. Di mana dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain, hal inilah yang dimaksud dengan data sekunder.⁵⁹

3.2.2. Penelitian lapangan (*Field research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh sejumlah data dilakukan secara langsung, di sini penulis memilih lokasi di Desa Taraitak Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan informasi di desa tersebut masih ada tanah yang dimiliki bersama oleh beberapa anggota keluarga yang sampai saat ini belum dibagi-bagi.

Dalam hal ini penelitian lapangan termaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial,

⁵⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2001 hal. 38.

individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁶⁰ Data tersebut diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya, inilah yang disebut data primer.⁶¹

3.3. Teknik Pengumpulan Data

3.3.1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang merupakan data sekunder guna mendapatkan landasan teori dengan menelaah : peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur atau tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

3.3.2. Studi lapangan

Dalam pengumpulan data primer ini, penulis menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara adalah proses tanya jawab lisan dalam mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu berperan sebagai penerima informasi dan yang lain sebagai pemberi informasi.⁶²

Di sini penulis menggunakan wawancara terpimpin disebut juga *guide interview* yang memimpin jalannya tanya jawab kearah yang telah ditetapkan sebelumnya, jadi mengikuti daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan dan tinggal menyajikan. Wawancara terpimpin ini langsung ditujukan kepada responden-responden antara lain :

⁶⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Op.cit.*, hal. 5.

⁶¹ Marzuki, *Metodologi Riset*, PT. Prasetia Widya Pratama, Jogjakarta, Cet. ke-9, 2002, hal. 55.

⁶² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II, Psikologi UGM, Yogyakarta, 2000, hal. 63.

1. Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Minahasa ;
2. Hukum Tua (Kepala Desa) Taraitak ;
3. Anggota keluarga pemilik tanah *kalakeran* ;
4. Pengukur tanah (*pangkur*) ;
5. Tokoh-tokoh masyarakat desa Taraitak.

3.4. Tehnik Pengolahan Data

Data-data yang telah diperoleh penulis baik data primer maupun data sekunder kemudian dikumpulkan untuk diteliti kembali dengan menggunakan metode *editing*, di mana untuk menjamin data-data yang diperoleh itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada, selanjutnya dilakukan pembetulan terhadap data yang keliru, dengan demikian dapat dilakukan penambahan data yang kurang lengkap yang kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk uraian.⁶³

3.5. Metode Analisis Data

Setelah data-data tersebut terkumpul, maka akan diinventarisasi dan kemudian di seleksi yang sesuai untuk digunakan menjawab pokok permasalahann dalam penelitian ini. Selanjutnya di analisa secara deskriptif analitis, yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori-teori yang ada dan yang dipakai, sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai

⁶³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 36.

permasalahan yang diteliti. Disamping itu digunakan juga metode analisa yang kualitatif dengan tujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.⁶⁴

⁶⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 20.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL PENELITIAN

4.1.1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kabupaten Minahasa adalah salah satu Daerah Tingkat II yang ada di Propinsi Sulawesi Utara.

Sebelum pemekaran (perluasan) Kota Manado dan Kota Bitung, Kabupaten Minahasa dibagi dalam 27 kecamatan yang terdiri dari 405 desa dan 107 kelurahan, di mana luas tanahnya mencapai 4.422 km². Untuk mengetahui luas wilayah di Kabupaten Minahasa tersebut dapat dirinci dalam tabel 1 sebagai berikut :

Tabel I

Luas Wilayah Kabupaten Minahasa

| No. | Kecamatan | Jumlah Desa | Luas (km ²) |
|-----|--------------|-------------|-------------------------|
| 1. | Tondano | 29 | 96,30 |
| 2. | Tomohon | 31 | 114,20 |
| 3. | Tombatu | 19 | 320,10 |
| 4. | Modoinding | 8 | 66,40 |
| 5. | Tompaso Baru | 18 | 235,90 |
| 6. | Motoling | 25 | 331,10 |
| 7. | T e n g a | 16 | 253,50 |
| 8. | Tombasian | 18 | 252,30 |
| 9. | B e l a n g | 12 | 218,50 |
| 10. | Tumpan | 15 | 183,60 |
| 11. | Ratahan | 10 | 161,20 |
| 12. | Langowan | 28 | 123,70 |
| 13. | Tompaso | 11 | 30,20 |
| 14. | Tareran | 13 | 98,20 |
| 15. | Sonder | 10 | 46,80 |
| 16. | Pineleng | 16 | 156,40 |
| 17. | Tombariri | 13 | 139,20 |
| 18. | W o r i | 14 | 144,00 |
| 19. | Dimembe | 23 | 295,40 |
| 20. | Kawangkoan | 13 | 48,20 |
| 21. | Airmadidi | 18 | 156,47 |
| 22. | Kauditan | 19 | 171,70 |
| 23. | Likupang | 31 | 280,60 |
| 24. | E r i s | 12 | 82,60 |
| 25. | K o m b i | 11 | 121,30 |
| 26. | Remboken | 11 | 38,80 |
| 27. | K a k a s | 22 | 155,20 |
| | | Total | 4.422,20 |

Sumber : Monografi Minahasa 2001

Sesudah mengalami pemekaran, luas wilayah kabupaten Minahasa berkurang khususnya kecamatan-kecamatan yang terletak di pinggiran kota Manado yaitu kecamatan Pineleng, Dimembe dan di pinggiran kota Bitung yaitu kecamatan Kauditan, karena sebagian dari desa-desanya dimasukkan ke dalam wilayah kedua kota tersebut. Sementara itu jumlah kecamatan di kabupaten Minahasa bertambah tiga kecamatan baru, yaitu kecamatan Toulimambot, Lembean Timur dan Ranoyapo sehingga jumlahnya menjadi 30 wilayah kecamatan yang terdiri dari 497 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk 732.124 jiwa (177.704 KK).

Dewasa ini luas wilayah kabupaten Minahasa sebesar 418.920 ha, dan diperkirakan terdapat 250.000 persil/bidang tanah. Di antaranya tanah yang sudah terdaftar (bersertipikat) berjumlah kurang lebih 51.000 persil (keadaan sampai dengan tahun 2000).⁶⁵

Secara global penyebaran penggunaan tanah yang ada di daerah-daerah Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut :

Tabel II
Penyebaran Penggunaan Tanah

| No. | Jenis Penggunaan Tanah | Luas (ha) | % |
|-----|---------------------------|-----------|-------|
| 1. | Perkampungan | 14.890 | 3,55 |
| 2. | S a w a h | 20.110 | 4,80 |
| 3. | Pertanian tanah kering | 239.913 | 57,28 |
| 4. | Alang-alang/semak belukar | 15.143 | 3,62 |
| 5. | H u t a n | 124.363 | 29,68 |
| 6. | D a n a u | 4.499 | 1,07 |

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa 2001.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor BPN Kabupaten Minahasa, Tanggal 18 Desember 2002.

4.1.2. Status Tanah di Kabupaten Minahasa

Status tanah di kabupaten Minahasa didominasi oleh tanah milik adat atau di Minahasa lebih populer dengan istilah tanah *pasini* dan tanah *kalakeran*. Diperkirakan luas tanah *pasini* dan *kalakeran* tersebut mencapai 80 % dari luas wilayah kabupaten Minahasa, yaitu sekitar 335.136 ha dan sisanya kurang lebih 83.784 ha adalah tanah negara yang terdiri dari hutan lindung, hutan produksi, ex hak barat (HGU) dan sebagainya.⁶⁶

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa bagian terbesar dari status tanah di Minahasa (+ 80 %) didominasi oleh tanah-tanah milik adat (tanah *pasini* dan tanah *kalakeran*). Bagian terbesar dari tanah-tanah *pasini* dan *kalakeran* tersebut hingga kini banyak yang belum terdaftar, jadi belum mempunyai sertifikat.

Belum terselenggaranya pensertifikatan tanah-tanah *pasini* dan *kalakeran* tersebut secara tuntas disebabkan oleh adanya berbagai masalah atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penelitian Kumaunang *et. al.* dinyatakan bahwa tanah *kalakeran* masih ada di Kabupaten Minahasa.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ R. Kumaunang *et. al.* ***Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Sulawesi Utara***, Bina Aksara, Jakarta, 1994, hal. 72.

Sedangkan hasil penelitian Pengadilan Tinggi SULUT, Di Sulawesi Utara khususnya di Kabupaten Minahasa masih terdapat hak-hak atas tanah yang antara lain meliputi : ⁶⁸

1. Hak *Pasini* (hak perorangan), yaitu hak diperoleh atau dipunyai seseorang secara turun-temurun baik melalui ayah dan ibu, atau harta pendapatan bersama mereka atau karena suatu transaksi dengan pihak lain seperti jual beli, tukar-menukar (baik dengan tanah atau benda-benda lain), hibah ataupun karena *landreform* dan sebagainya.
2. Hak *Kalakeran* (hak milik bersama) yang terbagi atas.
3. Hak *kalakeran* distrik yaitu di mana sebidang tanah menjadi milik bersama dari penduduk distrik yang pengolahannya dilakukan oleh anggota distrik.
4. Hak *kalakeran* desa/negeri yaitu di mana sebidang tanah menjadi milik bersama penduduk desa, yang pengolahannya dilakukan oleh anggota masyarakat desa.
5. Hak *kalakeran* famili/keluarga yaitu di mana sebidang tanah menjadi milik bersama atau dapat dari budel, yang pengelolaannya dilakukan secara bergilir (hak gilir) di antara keluarga serumpun. Jangka waktu pengelolaan dari giliran seseorang ditetapkan secara musyawarah.
6. Hak *tumoyo* (hak garap) yaitu hak atas tanah yang diperoleh seseorang untuk menggarap tanah tersebut atas dasar perjanjian bagi hasil.

⁶⁸ Anonim, *Hukum Tanah di Sulawesi Utara*, Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara, 1992, Manado, hal. 1.

7. Hak kawin/nikah, dalam mana seseorang wanita memperoleh *pasini* atas sebidang tanah karena pembagian mertuanya pada saat melangsungkan pernikahan.
8. Hak gadai yaitu hak yang diperoleh seseorang atas tanah karena perjanjian gadai dengan pemiliknya.
9. Hak sewa yaitu hak atas tanah yang diperoleh seseorang karena transaksi sewa-menyewa. Bentuknya sama dengan hak gadai.
10. Hak *neiwehe* yaitu hak daerah ini orang mendapat hak-hak atas tanah selain tersebut di atas, juga keluarga serumpun berkenaan dengan orang itu memangku jabatan hukum tua/Kepala Desa.
11. Hak hibah yaitu *pasini* yang diperoleh seseorang atas dasar pemberian.
12. Hak waris yaitu hak atas tanah yang diperoleh seseorang karena warisan.

4.2. PEMBAHASAN

4.2.1. Penguasaan Tanah di Minahasa

Sudah sejak dahulu setiap suku mempunyai sebuah wilayah dan hanya kaula-kaulanyalah yang boleh membukanya sesuka hati, menebang kayu dan mengumpulkan hasil-hasil hutan. Orang-orang bukan anggota suku tidak diberikan wewenang ini dan untuk melindungi hutan-hutan terhadap perkosaan yang mungkin dilakukan mereka, maka menurut pemberitaan Riedel dalam L. Adam ⁶⁹ oleh kepala suku dikirim patroli, yang harus menjelajahi hutan-hutan itu.

⁶⁹ L. Adam, *Op.cit.* hal. 161.

Tentu saja sesudah berakhirnya peperangan-peperangan antar suku, orang-orang bukan anggota distrik mendapat hak-hak agak lebih banyak. Dengan seizin kepala distrik yang bersangkutan mereka boleh menebang kayu dan mengumpulkan hasil-hasil hutan dalam wilayah di luar suku mereka, malahan tanah-tanah diserahkan kepada mereka, tetapi hak atas tanah itu tidak bersifat lama. Untuk hak tebang dan hak kumpul mereka tidak pernah, untuk membuka tanah hanya jarang membayar suatu *recognitie* atau upeti, asal saja mereka melakukan pelayanan-pelayanan rumah, kebun dan kandang pada kepala distrik yang bersangkutan. Jika sebuah upeti dibayar, maka biasanya hal itu terdiri dari sebagian dari panen padi yang diperuntukan bagi distrik yang bersangkutan.

Ada juga bentuk-bentuk yang lain dari hak ulayat ini sebagaimana yang dikemukakan G. A. WILKEN dalam L. Adam, yaitu : ⁷⁰ "*Het landbezit in de Minahassa*," bahwa anggota-anggota distrik tidak setiap tahun dapat mengerjakan tanah-tanah mereka semau-maunya, pemerintah distrik menunjukan, bersama-sama pemerintah desa setiap tahun, tempat di mana kebun-kebun harus dibuka.

Siapa yang tidak mempunyai tanah di kompleks yang ditunjuk itu harus menyewanya dari orang lain, malahan pemerintah distrik mempunyai wewenang jika banyak orang tidak mempunyai tanah ditempat yang ditunjuk itu menghentikan sementara hak-hak dari famili-famili atau orang-orang yang bersangkutan atas tanah-tanah itu dan menyerahkannya kepada anggota-

⁷⁰ *Ibid*, hal. 360-361.

anggota desanya dengan cuma-cuma, sesudah tahun panen orang-orang yang berhak, mendapat tanah mereka kembali. Pada saat ini kebiasaan ini belum hilang sama sekali, tetapi hak itu lambat-laun telah beralih kepada pemerintah desa saja dan hal ini hanya terdapat di desa-desa di mana masih terdapat berlimpah-limpah tanah yang dapat dikerjakan dan berhubungan dengan gangguan babi hutan dikehendaki untuk mengerjakan tanah-tanah kebun yang akan dikerjakan secara berangkaian.

Sejak dahulu kepala distrik mempunyai juga suatu jenis hak pencabutan hak milik untuk kepentingan umum istimewa untuk pendirian dan perluasan desa-desa. Jika untuk itu tanah dibutuhkan maka tuan tanah harus menyerahkan tanah itu dengan cuma-cuma, tetapi jika desa itu pada suatu waktu dipindahkan, maka tanah-tanah itu jatuh kembali pada orang-orang yang berhak pada mulanya. Juga bentuk hak (ulayat) ini lambat-laun akan hilang seluruhnya. Semula wewenang itu beralih dari pemerintah distrik ke pemerintah desa, sesudah itu Residen Jellesma menuntut pada tahun 1901 agar untuk penyerahan tanah itu dibayar suatu ganti rugi yang sepatutnya dan sekarang hal itu dengan hak milik yang terbatas di distrik-distrik sekitar danau di Tonsea', Manado, Kawangko'an, Sonder, Amurang telah hilang di sana tidak ada lagi campur tangan dari pemerintah desa dengan perluasan desa-desa dan memberikan tempat tinggal bagi sesama anggota desa.

Akhirnya perlu kiranya disebut suatu bentuk ketiga dari hak ulayat yaitu larangan untuk mengasingkan tanah kepada orang lain daripada sesama anggota distrik, hanya dengan berdiam menetap di distrik itu kita

dapat menjadi sesama anggota distrik dan mendapat hak untuk membeli tanah. Hubungan yang lebih baik antara penduduk dari distrik-distrik yang berbatasan satu dengan yang lainnya menyebabkan, mengapa adat ini termasuk pada masa lampau.

Tetapi yang paling mengejutkan adalah Pernyataan Tanah Milik Negara (*Domien-Verklaring*) tahun 1877 (*Ind. Staatsblad No. 55*), di mana pemerintah menganggap semua tanah di Minahasa sebagai milik negara.

Tindakan pemerintah ini adalah suatu pelaksanaan dan penerapan yang konsekuensi dari asas yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Tertinggi di Negeri Belanda.⁷¹ Pada hakekatnya pernyataan Tanah Milik Negara yang diumumkan pada tahun 1870 untuk Jawa dan Madura telah dinyatakan berlaku terhadap semua tanah Gubernemen di daerah Seberang oleh Ordonansi Raja tahun 1875, akan tetapi pemerintah ternyata menganggap masih perlu diadakan suatu peraturan khusus untuk Minahasa dalam *Staatsblad* tersebut.

Pernyataan Tanah Milik Negara khusus ini mengakibatkan terjadinya hasutan-hasutan, yang malahan beralih ke Negeri Belanda. Sudah pada 31 Maret 1877 duapuluh tiga kepala-kepala Minahasa menyampaikan sebuah surat permohonan kepada Gubernur Jenderal dan Parlemen Belanda (*Tweede Kamer*) supaya pernyataan Tanah Milik Negara itu ditarik kembali,

⁷¹ Lihat *Staatsblad* 1870, No.188 Pasal 1 dan Pasal 20 jo *Staatsblad* 1875 No. 199a.

diperbaharui kontrak antara Negara dan Minahasa dengan syarat, bahwa yang terakhir ini masih akan selalu dianggap sebagai negeri sekutu (*bondgenootschappelijk*) dan pada akhirnya dikeluarkan suatu ketentuan larangan untuk menjual tanah-tanah kepada orang-orang bukan orang Minahasa.⁷²

Keberatan pokok bersandar pada fakta bahwa Minahasa berdasarkan kontrak-kontrak lama, sama sekali tidak termasuk dalam wilayah Hindia Belanda yang diperintah secara langsung dan oleh karena itu pemerintah tidak berwenang untuk menyatakan diperlakukannya suatu Pernyataan Tanah Milik Negara. Pada saat itu *Residen Swaving*, yang harus memenuhi tugas yang kurang disenangi orang untuk melaksanakan pernyataan Tanah Milik Negara itu, kiranya harus dikatakan dalam suatu rapat dengan kepala-kepala pegawai dan orang-orang swasta, bahwa pada tahun 1870 oleh Pemerintah Tertinggi telah diberitahukan kepada Residen dalam sebuah surat pemerintah yang memuat uraian yang panjang lebar, bahwa dalam keadaan Minahasa pada waktu itu terdapat suatu alasan untuk masih menyatakan dengan tegas lagi negeri itu sebagai wilayah Gubernemen.

Barangkali oleh karena itulah maka bekas Residen Manado dan bekas Direktur Departemen Dalam Negeri C. Bosscher, yang menjabat jabatannya yang disebut terakhir antara tahun 1860 dan tahun 1870 dan juga adalah seorang penentang dari pernyataan Tanah Milik Negara, dengan sangat hati-

⁷² Surat permohonan itu seluruhnya di muat dalam *Indische Gids* tahun 1879, jilid I, hal. 463-466.

hati menganggap persoalan itu sama sekali terpisah dari pernyataan suku atau kaula.

Suatu keberatan yang lain terhadap pernyataan Tanah Milik Negara, yang kemudian sekali lagi disinggung oleh tuan Van Kol, sesudah beliau mengunjungi Minahasa, ialah bahwa penduduk akan mengalami kerugian karenanya, akan tetapi kita ketahui dari tulisan bekas Residen Jellesma, yang menjadi kontrolir di Minahasa dari 1876 sampai 1886 dan dari keterangan pemerintah dalam *Koloniaal Verslag* tahun 1877, bahwa suatu pernyataan Tanah Milik Negara merupakan suatu keharusan, oleh karena "sejak tahun 1870 tak jarang tanah-tanah yang telah ditanami oleh pemilik-pemilik pribumi atau tanah-tanah yang belum dibuka oleh kepala-kepala distrik dijual kepada orang Eropa."

Sayang, bahwa para penentang begitu sedikit mempergunakan adat karena hal ini tidak dapat disangsikan ada pertentangan yang tak dapat disangkal antara pernyataan Tanah Milik Negara dan hak-hak rakyat atas tanah, seperti hal itu pada waktu dahulu dilukiskan oleh G. A. WILKEN dalam C. van Vollenhoven : "*Verzameling van vragen, de regten betreffende welke in de Gouvernementslanden der residentie Menado op de onbebouwde gronden worden uitgeoefend*" (dengan pendek disebut "*Resume van Menado*"), dari tahun 1876.⁷³ Motif-motif pemerintah sebelum diambalnya keputusan memang harus sedemikian kuatnya, sehingga ia terpaksa

⁷³ C. van Vollenhoven, *Op.cit*, hal. 26-27.

melakukan tindakan yang berlawanan dengan asas pokoknya sendiri : memelihara “pranata-pranata dan kebiasaan-kebiasaan” dari rakyat.

Tetapi jika kita bersama VAN VOLLENHOVEN dan KLEINTJES ⁷⁴ memberikan penafsiran berikut pada pernyataan Tanah Milik Negara ini bahwa bagi Gubernemen hanya tersisa sedemikian hanya hak yang tersisa sesudah dikurangnya semua hak pribumi atas tanah, maka hak ulayat tidak sama sekali hilang oleh pernyataan Tanah Milik Negara itu.

Benar hak membuka tanah adat yang asli dari penduduk sesudah apa yang dinamakan ordonansi pembukaan tanah (*ontginnings ordonnantie*) tahun 1879 ⁷⁵ yang sekarang dalam banyak hal telah dibatasi, dengan demikian hak ini tidak hanya tersedia sesama anggota distrik, tetapi seorang yang bukan anggota distrik itu dapat juga memperoleh pemilikan yang langsung di luar distriknya sendiri, selanjutnya bukan saja kepada distrik, tetapi kepala pemerintahan setempat (*kontrollir*) juga berwenang untuk memberikan izin untuk membuka tanah.

Akan tetapi selagi hak pembukaan tanah (*ontginningsrecht*) dibatasi terhadap hak padang rumput, hak terbang dan hak mengumpul, kebiasaan-kebiasaan oleh peraturan-peraturan lama masih dibiarkan hidup (lihat Pasal 8 dari Peraturan Agraria), tetapi “dengan memperlihatkan peraturan-peraturan yang telah atau masih akan dikeluarkan lebih lanjut tentang hal itu.”

⁷⁴ *Ibid*, hal. 31

⁷⁵ Lihat Staatsblad 1981 No. 80 mulai berlaku 1 April 1919.

Untuk mencegah pembabatan hutan yang sembarangan, maka *Residen STAKMAN* pada tahun 1891 telah menggantungkan hak penebangan kayu pada suatu izin bermaterai dari Kepala distrik. Ketentuan ini masih tetap berlaku, oleh karena pembuat Undang-undang yang lebih tinggi belum mengatur materi ini.

Distrik sebagai persekutuan hukum tidak hanya mempunyai hak ulayat Indonesia, tetapi di sana-sini juga hak milik atas tanah.

Hak milik (juga hak ulayat) dari suatu persekutuan hidup yang demikian dulu dinamakan dan sekarang masih dinamakan *kalakeran* (Tb.) atau *kekelian* (Tb.) dari *laker*, *keli* = banyak. Demikianlah dalam bahasa Tombulu orang berbicara tentang tana' *kalakeran um balak*, yang demikian berarti tanah distrik.

Tanah-tanah ini tidak banyak artinya, tanah-tanah itu terbentuk sesudah diaturnya batas-batas distrik dahulu suatu sumber pertikaian-pertikaian yang tak berkesudahan oleh ahli ukur tanah Paepke Bulow, karena perubahan yang terpaksa dari batas-batas lama, maka dapat terjadi, bahwa tanah-tanah yang diduduki oleh penduduk dari distrik yang satu, jatuh pada distrik yang lain dan dengan demikian menurut hukum adat lama harus ditinggalkan oleh penduduknya dan dengan demikian menjadi milik dari distrik yang pertama.

Oleh karena itu maka kebanyakan tanah-tanah distrik terletak pada perbatasan-perbatasan. Anggota-anggota distrik dapat membuka tanah itu dan malahan menanaminya dengan tanaman-tanaman tua, asalkan dengan

seizin kepala distrik. Pemindahan hak tanah-tanah itu dilarang oleh adat, namun menurut beberapa kepala distrik pernah dilakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan larangan ini.

Demikianlah menurut keterangan-keterangan, yang di dapat oleh Asisten Residen G.J. VAN DONGEN pada tahun 1918 Manado dahulu hampir seluruhnya adalah "*kalakeran*."⁷⁶

Sekarang masih terdapat di ibukota Manado milik-milik dari : Tomohon, Tondano, Ka'kas, Tombariri, Langowan, Remboken, Aères, Kalabat-di-bawah (atau *Wanua Urè*) dan di Amurang dari : Sonder, Kawangko'an, Tombasian.

Kalakeran-kalakeran ini bagi Manado merupakan apa yang dinamakan kampung rakyat bagi kota-kota di Jawa, yakni kumpulan rumah yang kecil, miskin dan kampung kotor di antara rumah-rumah Eropa. Untuk distrik-distrik hal itu telah menjadi beban dengan sulit sekali kepala distrik mengumpulkan *verponding* (pajak), yang tak mungkin dibayar oleh distrik sendiri dan dibagi sama rata di antara penghuni.

Dahulu distrik tidak hanya mempunyai tanah-tanah tetapi juga pesanggarahan-pesanggarahan disebut loji, kantor-kantor bagi kepala-kepala, penjara-penjara, pasar-pasar, malahan beberapa kuda, yang dipergunakan oleh kepala-kepala dan pejabat-pejabat yang melakukan

⁷⁶ Dalam bahasa melayu Manado disebut *kalakeran* : kata untuk itu dalam bahasa Tombulu adalah *kalakeran*.

perjalanan keliling (*turne*) dan pakaian-pakaian untuk “kebesaran” (*cakalele*, upacara penyambutan para pembesar agung) dari milik-milik itu sekarang masih tinggal hanya kantor-kantor (beberapa telah diperbaharui dan dibangun kembali oleh negara) dan pasar-pasar.

Yang paling akhir ini masih merupakan satu-satunya pendapatan untuk kas distrik, yang dahulu jauh lebih penting : bahkan gaji ahli-ahli ukur tanah (*landmeter*) dan guru-guru desa dahulu dibayar dari pendapatan ini. Dasar kas-kas ini ialah sejumlah besar uang, yang dapat diperoleh distrik sebagai hasil penjualan “*kalakeran-kalakeran*” seperti disebut di atas, ditambah dengan iuran-iuran untuk menebus kerja rodi (*herendienst*).

4.2.2. Wewenang Masyarakat Hukum Adat atas Tanah *Kalakeran* di Minahasa Dewasa ini

Semenjak tahun 1960 terjadi suatu perubahan yang fundamental dalam struktur hukum pertanahan di negara kita. Perubahan tersebut juga membawa dampak terhadap kewenangan dari pada masyarakat hukum adat atas tanah. Hal ini adalah dikarenakan oleh perubahan konsepsionil yang diintrodusir oleh UUPA berkenaan dengan masalah penguasaan tanah ini.

Menurut konsepsi UUPA maka tanah, sebagaimana halnya juga dengan bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang ada dalam wilayah Republik Indonesia, adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia yang merupakan kekayaan Nasional. Hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanahnya dimaksud adalah suatu hubungan yang bersifat abadi. Untuk mengelola

secara berdaya guna dan berhasil guna, maka tanah begitu juga bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Dalam Pasal 2 ayat 2 UUPA ditegaskan mengenai arti dari pada hak menguasai tersebut, meliputi wewenang untuk :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut ;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa ;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dengan berdasarkan atas hak tersebut, maka seluruh tanah yang ada pada tingkat tertinggi berada di bawah penguasaan negara di mana negara adalah merupakan penguasa tertinggi atas segala tanah yang ada di wilayah Republik Indonesia, sehingga dengan demikian kewenangan dari masyarakat hukum adat setempat, sekalipun oleh UUPA itu sendiri secara tegas masih menyatakan mendasarkan diri pada Hukum Adat, sebagaimana yang dapat kita baca di dalam Pasal 5 UUPA yang dinyatakan bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia, serta peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Adanya ketentuan yang demikian ini menimbulkan dua akibat terhadap hukum adat tentang tanah yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, di mana disatu pihak ketentuan tersebut memperluas berlakunya Hukum Adat tidak hanya terhadap golongan penduduk yang dahulunya disebut dengan "*Inlander*" atau Pribumi akan tetapi juga berlaku untuk mereka yang dahulunya termasuk golongan Eropah dan Timur Asing. Hukum adat di sini tidak hanya berlaku untuk tanah-tanah Indonesia saja akan tetapi juga berlaku untuk tanah-tanah yang dahulunya termasuk dalam golongan tanah Barat. Akan tetapi dilain pihak hukum adat tentang tanah tersebut telah dibatasi sedemikian rupa dengan aneka pembatasan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal dimaksud.

Dengan demikian hukum adat menurut pengertian UUPA tidaklah sama dengan hukum adat yang dikenal sebelumnya.⁷⁷

Bahkan dari beberapa pengamatan yang dilakukan terhadap pengertian hukum adat menurut UUPA terutama dengan melihat pada materi yang terkandung di dalamnya, maka pernyataan yang tersebut dalam Pasal 5 tersebut dapat menimbulkan keraguan apakah memang benar hukum agraria berdasarkan atas hukum adat.⁷⁸

Sekalipun itu ada beberapa ahli mencarikan justifikasi dengan menyebutkan sebagai hukum adat yang telah *disaneer* atau hukum adat

⁷⁷ Abdurrahman, *Benarkah Hukum Agraria Nasional berdasarkan Hukum Adat*, Harian Sinar Harapan tanggal 29 September 1975.

⁷⁸ Abdurrahman, *Masalah Undang-Undang Pokok Agraria dan Praktek Pelaksanaannya*, Fakultas Hukum Unlam, 1976. hal. 30.

modern.⁷⁹

Setelah berlakunya ketentuan tersebut di atas maka kewenangan berupa penguasaan tanah-tanah oleh persekutuan hukum dalam hal ini tanah *kalakeran* mendapat pembatasan sedemikian rupa dari kewenangan pada masa-masa sebelumnya karena sejak saat itu segala kewenangan mengenai persoalan tanah terpusat pada kekuasaan negara. Kalau demikian bagaimana kewenangan masyarakat hukum adat atas tanah yang kita sebut dengan hak ulayat, apakah juga masih diakui berlakunya atau mengalami penambahan sebagaimana halnya dengan ketentuan-ketentuan hukum adat tentang tanah *kalakeran* di Minahasa.

Mengenai hal tersebut dapat kita lihat dalam beberapa ketentuan dan UUPA, antara lain :

- a. Pasal 2 ayat (4) "Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dari Masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional, menurut Ketentuan Peraturan Pemerintah ;
- b. Pasal 3 "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal (1) dan (2) pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi" ;
- c. Pasal 22 ayat 1 terjadinya hak milik menurut hukum adat di atur dengan peraturan Pemerintah.

Bilamana kita teliti lebih jauh ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka akan terlihat suatu perubahan yang cukup fundamental oleh karena

⁷⁹ Abdurrahman, *Pengaruh UUPA Terhadap Tanah-tanah Adat di Indonesia*, Harian Kompas, 3 September 1977.

masyarakat-masyarakat hukum adat itu sudah tidak mempunyai kewenangan yang bersifat otonom dalam persoalan pertanahan dan masyarakat hukum adat hanyalah berfungsi selaku “kuasa pelaksana” dari hak menguasai negara. Inipun tidak mutlak sifatnya oleh karena pelimpahan kuasa di maksud hanyalah dilaksanakan sekedar diperlukan, sehingga kalau hal yang demikian tidak diperlukan tidak diharuskan untuk memberikan kuasa kepada masyarakat-masyarakat hukum adat setempat, sehingga dengan demikian kekuasaan masyarakat hukum adat atas tanah tersebut hanyalah sekedar suatu wewenang limpahan saja.

Disamping itu Pasal 3 UUPA masih memberikan adanya pengakuan terhadap hak ulayat. Hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat masih diakui sepanjang dalam kenyataannya di masyarakat masih ada. Andaikata karena terjadinya proses individualis sering hak ulayat ini mulai terdesak, yang memberikan pengakuan secara khusus terhadap hak-hak perorangan. Dengan tumbuh dan kuatnya hak-hak yang bersifat perorangan dalam masyarakat hukum adat mengakibatkan menipisnya hak ulayat. Hak ulayat ini diakui oleh Pemerintah sepanjang kenyataannya masih ada, kalau sudah tidak ada tidaklah perlu untuk membuat adanya hak ulayat baru.

Hak ulayat yang diakui dalam pasal tersebut bukanlah hak ulayat seperti dengan masa sebelumnya, oleh hak ulayat yang masih ada harus disesuaikan sedemikian rupa yang diselaraskan dengan kepentingan Nasional dari Negara dengan pembatasan bahwa hak ulayat di maksud tidak

boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Sedangkan mengenai Pasal 22 ayat 1 memperlihatkan gambaran yang cukup ironis oleh karena digantungkannya syarat untuk mendapatkannya hak milik menurut hukum adat yang untuk selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka di bidang hukum pertanahan yang berlaku sekarang terjadi semacam "dualisme terselubung" adanya hak-hak menurut hukum adat atas tanah di satu pihak dan adanya hak-hak berdasarkan Hukum Agraria (UUPA) di lain pihak. Kesemuanya kelihatannya dikembangkan kearah kesatuan hukum dibulatkan menjadi hak-hak sebagaimana diatur dalam UUPA.

Perubahan-perubahan di maksud juga terlihatnya di dalam pelaksanaan pembukaan tanah. Menurut Pasal 46 UUPA hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh Warga Negara Indonesia yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam penjelasan pasal dimaksud disebutkan bahwa hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan adalah hak-hak dalam hukum adat yang menyangkut tanah. Hak-hak ini perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah demi kepentingan umum yang lebih luas dari pada kepentingan orang atau masyarakat yang bersangkutan. Dari sini jelaslah titik berat pandangan tidaklah dilihat dari sudut kepentingan masyarakat hukumnya itu sendiri akan tetapi sudah ditingkatkan menjadi masalah Nasional.

Sekalipun Pasal 46 UUPA menunjuk akan adanya suatu Peraturan Pemerintah sebagai pengaturan tindak lanjutnya namun hingga sekarang ini peraturan dimaksud tidak pernah ada. Persoalan ini hanya kita jumpai pengaturannya di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6/1972 tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah. Di dalam peraturan tersebut telah digariskan beberapa ketentuan mengenai hak membuka tanah ini sebagai berikut :

1. Pasal 6 Gubernur Kepala Daerah memberi Keputusan mengenai izin untuk membuka tanah, jika luas tanahnya lebih dari 10 Ha (sepuluh hektare) tetapi tidak melebihi 50 Ha (hektare)
2. Pasal 10 Bupati/Walikota Kepala Daerah memberikan keputusan mengenai izin untuk membuka tanah, jika luasnya lebih dari 2 Ha tetapi tidak lebih dari 10 Ha.
3. Pasal 11 Kepala Kecamatan memberi keputusan mengenai izin membuka tanah jika luasnya lebih dari 2 Ha dengan memperhatikan Pertimbangan Kepala Desa yang bersangkutan atau pejabat yang setingkat dengan itu.

Dari ketentuan tersebut di atas, kelihatannya mengenai persoalan pembukaan tanah ini tidak lagi dikaitkan dengan Hukum Adat akan tetapi sudah dipandang sebagai suatu kewenangan administratif. Dengan demikian adalah wajar bilamana kewenangan untuk memberikan izin membuka tanah yang semula dimiliki oleh Kepala Masyarakat umpamanya Kepala Desa diberikan kepada Pejabat Pemerintah umpamanya Camat, sekalipun fungsi Kepala Desa masih tetap dihargai untuk dimintakan peritimbangannya.

Begitu pula persoalannya dalam pelaksanaan berbagai transaksi tanah, di mana semula peranan Kepala masyarakat hukum adat/Kepala Desa sangatlah menentukan sekali telah diberikan kepada pejabat-pejabat Pemerintah yang dinamakan Pejabat Pembuat Akta Tanah, termasuk Camat. Tanpa melalui pejabat tersebut tidak dapat dilaksanakan transaksi di maksud, dan bahkan menurut Pasal 44 dan Peraturan Pemerintah No.10/1961 Kepala Desa secara tegas dilarang dan diancam dengan ketentuan Pidana bilamana ia mengesahkan transaksi tanah di maksud.

Jelaslah bahwa mengenai persoalan wewenang masyarakat hukum adat atas tanah telah terjadi banyak perubahan baik secara konsepsional maupun secara operasional, sebagai akibat dari pada adanya suatu perombakan yang bersifat fundamental melalui UUPA, sesuai dengan politik Agraria Nasional.

Hal yang demikian sangat terasa sekali, walaupun oleh UUPA telah ditegaskan bahwa Hukum Agraria Nasional itu didasarkan pada Hukum Adat dan beberapa hak masyarakat hukum adat masih diakui, namun pengakuan yang demikian tidaklah berpangkal pada penghargaan terhadap hukum adat dan kewenangan dari pada masyarakat hukum adat itu, melainkan berpangkal pada kewenangan Pemerintah, berdasarkan pola pemikiran dalam permasalahan Nasional.

Dalam pelaksanaan lebih jauh masih diperlukan adanya penegasan mengenai apa sebenarnya yang menjadi kewenangan dari pada masyarakat hukum adat atas tanah dan mengarahkan kewenangan tersebut kepada hal-

hal yang dapat menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam mengelola soal pertanahan.

Sebagaimana diketahui bahwa tanah *kalakeran* itu adalah tanah yang tidak atau belum terbagi, sedang penggarapannya digantungkan kepada suatu musyawarah kelompok (negeri atau keluarga).

Dengan berkembangnya masyarakat Minahasa secara kuantitatif dan kualitatif sarat dengan adanya program peningkatan pangan dan gizi timbullah masalah dengan pertanyaan apakah lembaga tanah *kalakeran* masih perlu dipertahankan. Bilamana lembaga ini tidak sesuai lagi, maka keadaannya perlu diselesaikan secara bertahap dengan suatu rencana yang teratur terhadap tanah-tanah tersebut melewati suatu peraturan hukum yang lebih baik.

Setidaknya lebih bergunalah tanah *kalakerannya* dibagi untuk dikerjakan, sehingga tanah pusaka bagaimana pun seharusnya dibagi.

Hasil investarisasi akan merupakan kelengkapan informasi bagi pemerintah untuk menetapkan kebijaksanaan dalam hukum pertanahan, khususnya hukum tentang tanah *kalakeran*. Dengan demikian akan diperoleh suatu keadaan kepastian hukum yang lebih efektif. Ini berarti menunjang pembangunan dan stabilitas di dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, perlu diadakan penelitian yang lebih luas di semua kabupaten se Sulawesi Utara, karena memang sudah pasti bahwa pada masyarakat tanah garapan masih luas dan untuk mempertahankan kelangsungan hidup kepala keluarga pada puluhan tahun lalu tidak

menghendaki pembagian tanah yang adalah sumber makanan yang penting bagi seluruh keluarga itu.

Akan tetapi karena sekarang penduduk telah berkembang dan perbandingan jumlah penduduk dengan tanah garapan relatif berkurang maka setiap jengkal tanah harus diproduktifkan termasuk tanah *kalakeran* keluarga dan desa. Karena itu keadaan tanah *kalakeran* perlu mendapat perhatian dari pemerintah untuk menetapkan kebijaksanaan berdasarkan wewenang yang ada menurut Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 5 tahun 1960 (UUPA).⁸⁰

Bahwa register kampung/garisan tanah desa yang ditetapkan untuk daerah Minahasa sejak tahun 1875 (Surat Edaran Residen Manado No.1870 Tgl 20 Agustus 1875 Yo. No. 2141 Tgl 20 September 1895) sebagian sudah hilang, rusak dan sebagainya, maka perlu diadakan suatu bentuk register tanah yang baru menurut keadaannya dewasa ini. Karena semua tanah *kalakeran* dan tanah *pasini* harus diukur kembali dan dimasukkan ke dalam buku register tanah semua desa, sedangkan tembusan atau salinan disampaikan kepada kepala pemerintahan kecamatan.

Bahwa dengan tidak adanya keseimbangan antara jumlah penduduk dan luas areal tanah pertanian di tiap-tiap kecamatan dapat mempengaruhi produksi pangan, oleh karena tenaga dan lapangan kerja turut menentukan dalam usaha intensifikasi dan ekstensifikasi tanah-tanah pertanian. Kiranya

⁸⁰ F.X.J. Kalangi, *Tanah Kalakeran di Minahasa Dewasa ini*, Majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tahun I Nomor 3 1975, hal. 108.

hal ini perlu pula mendapat perhatian dari pemerintah untuk mengatur keseimbangannya.

Demi kepastian hukum dan kepastian hak, maka tanah-tanah *kalakeran* yang masih ada kiranya dapat segera dibagi-bagikan kepada anggota-anggota keluarga yang bersangkutan, apabila jumlah anggota keluarga secara ekonomi masih kurang, sedangkan tanah-tanah *kalakeran* yang sudah sulit untuk dibagi-bagikan karena terlalu banyak anggota-anggota keluarga yang berhak atasnya, sebaiknya diserahkan saja kepada pemerintah desa setempat untuk mengatur pengolahannya, agar dengan demikian tanah-tanah *kalakeran* tersebut dapat dimanfaatkan (diolah) sebagaimana mestinya dan hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Guna terciptanya tertib hukum di bidang agraria (hukum tanah), maka disamping menerapkan peraturan-peraturan di bidang hukum agraria yang telah ada (UU No. 5 Tahun 1960 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya), perlu dibentuk suatu peraturan yang khusus mengatur tentang tanah *kalakeran* di Minahasa.

Oleh banyak penulis telah dikemukakan bahwa pada umumnya tanah *kalakeran* belum dibagi, karena banyak kendala yang menghalangi untuk melaksanakan pembagian itu. Satu di antaranya masalah yang sudah berlangsung lama ialah bahwa tanah *kalakeran* sangat berhubungan dengan masalah hukum waris. Oleh karena sangat dibutuhkan untuk kehidupan keluarga dan lahan pembangunan, tanah-tanah *kalakeran* dapat dibagi-

bagikan sejak sekarang melalui suatu cara yang pantas dan layak serta berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

Bilamana masalahnya tetap tidak dapat dipecahkan sedangkan tanah tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan banyak orang, maka tidaklah salah apabila sebagai suatu tindakan sementara kepala pemerintahan kecamatan dapat mengambil suatu "*bestuursmaatregel*" (tindakan pemerintah).

4.2.3. Pemanfaatan Tanah *Kalakeran* oleh Masyarakat

Pemanfaatan tanah *kalakeran* oleh masyarakat untuk kepentingan ekonomi sebenarnya sudah sejak lama dilakukan yaitu sejak jaman kolonial Belanda seperti diuraikan berikut ini :

Dalam perkembangan tanah di Kabupaten Minahasa sampai tahun 1830 hanya mengenal adanya tanah milik komunal (milik bersama) oleh masyarakat. Pengelolaannya hanya untuk kebutuhan bahan makanan kelompok masyarakat, tetapi setelah bangsa Belanda datang di Minahasa perubahannya menjadi sangat drastis. Masyarakat pada waktu itu diperintahkan untuk menanam kopi dan dibudidayakan. Maka muncul adanya tanah *kalakeran* distrik, tanah *kalakeran* desa/negeri, tanah *kalakeran* keluarga/famili dan tanah perorangan (tanah *pasini*).⁸¹

L. Adam menyatakan bahwa untuk mengetahui apa itu tanah *kalakeran*, kita harus membedakan antara hak milik pribadi (*pasini*, *pakasaan*) dari hak milik bersama (*kalakeran* dari kata *laker* dalam bahasa Tombulu berarti banyak).⁸²

⁸¹ Hasil wawancara dengan Novy Aruperes (Kepala Desa), Jan Emor dan H.E. Emor Selaku Tokoh Masyarakat pada Lokasi Penelitian, Tanggal 20 Desember 2002.

⁸² L. Adam, *Adat Istiadat Suku Bangsa Minahasa*, Bhratara, Jakarta, 1987, hal. 90.

Hal ini berarti bahwa hak persekutuan hukum atas tanah yang dikenal sebagai tanah *kalakeran* itu masih tetap eksis bersama-sama dengan hak perseorangan (individual) atas tanah, yang dikenal dengan istilah *pasini*.

Tanah *kalakeran* distrik dan tanah *kalakeran* desa/negeri, karena kedudukan yang identik dengan hak ulayat tentu saja mengalami pergeseran kedudukan dengan diundangkannya UUPA.

Bila dilihat dari sejarahnya tanah *kalakeran*, merupakan tanah-tanah yang lahir pada suasana hukum Adat, maka hak-hak yang melekat di atasnya adalah hak-hak menurut Hukum Adat, jadi pada hakekatnya sifat tanah *kalakeran* adalah jenis tanah Adat dan subyek pemilikannya adalah banyak orang sehingga dilihat dari subyeknya maka tanah *kalakeran* dibagi atas tiga jenis : ⁸³

1. Tanah *kalakeran* distrik, biasanya didapat melalui merambah hutan dan penguasaannya berada di tangan distrik.
2. Tanah *kalakeran* desa/negeri, di dapat melalui merambah hutan dan penguasaannya ada di tangan desa.
3. Tanah *kalakeran* keluarga/famili, didapat melalui merambah hutan dan dibeli bersama serta penguasaannya ada di tangan keluarga.

Dalam kaitan dengan uraian di atas juga sesuai keterangan tokoh-tokoh masyarakat di lokasi penelitian, mereka menyatakan bahwa tanah *kalakeran* mempunyai ciri-ciri antara lain : ⁸⁴

⁸³ Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Taraitak selaku Tokoh Masyarakat pada Tanggal 20 Desember 2002.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat selaku Pemilik Tanah *Kalakeran* pada Lokasi Penelitian pada Tanggal 20 Desember 2002.

- (1) Tanah *kalakeran* ialah kepemilikan bersama hak atas tanah bertujuan untuk mengikat kesatuan kekeluargaan, baik kesatuan keluarga/famili, kesatuan desa/negeri dan kesatuan distrik.
- (2) Tanah *kalakeran* mempunyai isi yang sama yaitu semua anggotanya mempunyai hak pakai atas tanah yang dikuasainya. Dalam hak pakai anggota-anggotanya tidak dapat menanami tanah tersebut dengan tanaman keras seperti kelapa, cengkeh dan pala. Dalam pengelolaan tanah *kalakeran* desa/negeri harus minta izin tersebut pada pemerintah desa.
- (3) Dalam penguasaan tanah *kalakeran* pada anggota-anggotanya, tidak dibenarkan mengalihkan kepemilikan hak atas tanah pada tanah *kalakeran* kepada orang lain.
- (4) Tidak dikenal adanya ketentuan bahwa hak atas tanah terhadap tanah *kalakeran*, menjadi hapus karena tidak diolah selama lima tahun berturut-turut. Hak atas tanah pada tanah *kalakeran* terbuka dan berlangsung terus-menerus tanpa adanya pencabutan hak atas tanah.
- (5) Yang boleh mendapat hak pakai dan hak menikmati hasil pada tanah-tanah *kalakeran* tersebut hanya para anggota-anggota keluarga (untuk tanah *kalakeran* keluarga), anggota-anggota desa/negeri (untuk tanah *kalakeran* desa/negeri) dan anggota-anggota distrik (untuk tanah *kalakeran* distrik).
- (6) Tanah *kalakeran* keluarga/famili tidak boleh dialihkan kepada orang lain, karena tanah tersebut tetap milik bersama, sebagai pengikat

kekeluargaan kecuali semua anggota keluarga menyetujui diadakannya pembagian tanah tersebut.

- (7) Pemilikan hak atas tanah terhadap tanah *kalakeran* tidak dapat disendirikan, hanya setiap anggota tidak boleh mendapat pembagian tersendiri yang menjadi miliknya.

Tanah *kalakeran* di samping mempunyai ciri-ciri juga fungsi antara lain : ⁸⁵

1. Tanah *kalakeran* desa/negeri berfungsi untuk pekuburan (pemakaman), perkampungan, sawah, kebun dan berburu. Disamping itu, untuk sarana-sarana sosial budaya.
2. Tanah *kalakeran* keluarga/famili berfungsi untuk pekuburan keluarga, sawah, ladang, kebun dan perumahan keluarga.

Dalam mengatur/mengelola Tanah *kalakeran* desa negeri adalah hukum tua (kepala desa) sebagai kepala persekutuan (*Tonaas Umbanua*) bersama-sama dengan masyarakat. Tetapi setelah diberlakukannya UUPA, hukum tua (kepala desa) makin lemah posisinya.

Dengan diberlakukannya UUPA bukan hanya unifikasi UUPA, tetapi unifikasi terhadap hak atas tanah. Hal ini membawa konsekuensi terhadap status tanah *kalakeran* sebagai tanah Adat. Sampai sekarang belum ada penegasan, sesuai ketentuan dalam UUPA Bagian IX yaitu bahwa ketentuan

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala Desa selaku Tokoh Masyarakat pada Tanggal 20 Desember 2002.

konversi dan wewenang pengaturannya berada di tangan Mendagri, seperti tanah-tanah Adat menjadi hak pakai.

Dalam Peraturan Mendagri No. 4 Tahun 1975, adanya keharusan Pendaftaran Hak Atas Tanah kepunyaan bersama, tapi pada kenyataannya peraturan ini tidak pernah dilaksanakan, karena pendaftaran tanah *kalakeran* sebagai milik bersama di sepuluh desa di tempat penelitian tidak dilaksanakan. Akibatnya sampai saat ini data yang pasti tentang obyek dan luas tanah *kalakeran* belum ada.

Dalam wawancara penulis dengan tokoh-tokoh masyarakat, sebenarnya saat ini tanah *kalakeran* desa/negeri yang ada tinggal tanah lapangan/kosong yang dimanfaatkan untuk kegiatan Desa dan tanah pekuburan.⁸⁶

Tanah *kalakeran* keluarga/famili bila dilihat dari pemilikan perseorangan/kelompok famili sebenarnya hanya sedikit, akan tetapi bila dilihat dari tanahnya potensi untuk dipergunakannya sangat besar. Tanah *kalakeran* keluarga/famili sebenarnya juga saat ini sudah mulai banyak berkurang. Sesuai keterangan tokoh-tokoh masyarakat pengurangan tersebut disebabkan hampir sebagian Tanah *kalakeran* keluarga/famili sudah dibagi-bagi dan berubah menjadi tanah perorangan (tanah *pasini*).

⁸⁶ Hasil Wawancara pada Tanggal 20 Desember 2002.

Dari hasil wawancara penulis dengan tokoh-tokoh masyarakat, mereka menyatakan bahwa sesuai ketentuan adat, sebenarnya tanah *kalakeran* tidak boleh dibagi-bagikan dengan alasan-alasan yaitu : ⁸⁷

1. Tanah *kalakeran* sesuai dengan pengertiannya milik bersama dan sebagai pengikat kekeluargaan dalam masyarakat desa.
2. Kalau sampai anggota keluarga membagi-bagi untuk menjadi tanah *pasini*, maka arti tanah *kalakeran* otomatis hilang dengan sendirinya.

Dalam kaitan di atas, terlihat bahwa kepemilikan di masing-masing desa luasnya tinggal sedikit baik tanah *kalakeran* desa/negeri dan tanah *kalakeran* keluarga/famili. Hal ini bila tidak diantisipasi masalah tanah *kalakeran* sebagai milik bersama, yang ditujukan untuk mengikat kesatuan kekeluargaan, maka tanah *kalakeran* sebagai tanah Adat tinggal sejarah. Padahal masyarakat Minahasa khususnya, masih menghendaki adanya tanah *kalakeran* sebagai sarana untuk tetap mempertahankan tali kekerabatan dan melestarikan budaya Minahasa.

Tanah *kalakeran* yang dapat dialihkan, sesuai dengan keterangan tokoh-tokoh masyarakat adalah terbatas pada hak *pasini* yang bukan tanah leluhur orang tua (*budel*). Tanah *kalakeran* distrik sejauh ini, tidak pernah penulis temui, walaupun ada desa-desa yang berkedudukan tepat di depan kantor kecamatan, sesuai keterangan tokoh-tokoh masyarakat mereka menyatakan bahwa dahulu distrik terdiri dari beberapa desa, jadi pada waktu

⁸⁷ *Ibid*

berdiri desa baru, maka tanah distrik diserahkan kepada desa yang bersangkutan.

Dalam wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat mereka menyatakan bahwa tanah *kalakeran* desa/negeri dan tanah *kalakeran* keluarga/famili yang masih ada sekarang, tetap dipertahankan sebagai tanah Adat, sebab tanah *kalakeran* desa/negeri bermanfaat dan sebagai pengikat kesatuan desa terutama dalam aspek pelestarian nilai-nilai budaya. Tanah *kalakeran* keluarga/famili berfungsi sebagai pengikat kesatuan keluarga dan bermanfaat dalam meningkatkan taraf ekonomi keluarga.⁸⁸

Dalam kaitan tersebut, tokoh-tokoh masyarakat dan kelompok keluarga menghendaki adanya peraturan tertulis yang mengatur secara khusus mengenai pemanfaatan/penggunaan tanah *kalakeran* desa/negeri dan tanah *kalakeran* keluarga/famili oleh Pemerintah Daerah terutama sejak diberlakukannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.⁸⁹

Berdasarkan uraian di atas, tanah *kalakeran* menurut kenyataannya masih eksis walaupun pelaksanaannya tidak mutlak setelah diberlakukannya UUPA. Tanah *kalakeran* desa/negeri identik dengan hak ulayat, sedang tanah *kalakeran* keluarga/famili adalah hak bersama suatu kelompok keluarga/famili atas tanah. Eksistensi tanah *kalakeran* desa/negeri dalam suasana pembangunan ini dapat diabaikan/dikesampingkan untuk

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ *Ibid*

kepentingan pembangunan. Tanah *kalakeran* keluarga/famili masih dapat dipertahankan eksistensinya oleh kelompok keluarga yang berhak.

Jika bentuk persekutuan hukum dihubungkan dengan hak atas tanah menurut hukum Adat, maka hak persekutuan atas tanah pada masyarakat *territorial* dan masyarakat *geneologis* adalah hak persekutuan *territorial* termasuk di dalamnya tanah *kalakeran* distrik dan tanah *kalakeran* desa/keluarga.

4.2.4. Sikap Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Tanah *Kalakeran* Untuk Pembangunan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tentang penghapusan swapraja-swapraja dan hak-hak wewenangnya atas tanah yang tidak boleh mengakibatkan hilangnya hak ulayat dan hak-hak adat lainnya, maka pemerintah ingin menegaskan bahwa hak ulayat yang diakui adalah hak ulayat yang nyata-nyata masih ada, artinya yang tanah tidak ada tidak kita hidupkan kembali (lihat pada kedudukan hak ulayat pada UUPA).

Dalam pernyataan di atas, kenyataan tanah *kalakeran* sebagai tanah Adat masih ada sampai sekarang dalam suasana diberlakukannya UUPA. Karena masih ada tanah *kalakeran* desa/negeri di Kabupaten Minahasa untuk itu masyarakat menghendaki tetap dipertahankan dengan catatan harus ada aturan khusus yang mengatur pemanfaatan tanah *kalakeran* desa/negeri untuk pembangunan.

Dari hasil penelitian penulis tersebut diperoleh data masyarakat Minahasa sebenarnya menghendaki agar tetap dipertahankan sebagai tanah

adat tetapi harus ada aturan yang jelas mengenai pemanfaatannya, seperti tanah Bengkok di Jawa sudah ada aturan yang jelas mengenai pemanfaatannya.

Untuk tanah *kalakeran* keluarga/famili, masyarakat menghendaki juga tetap dipertahankan, karena sebagai pengikat kesatuan keluarga/famili, ada yang sudah dibagi oleh masyarakat untuk dikelola sendiri-sendiri.⁹⁰

4.2.5. Kendala-kendala Pemanfaatan Tanah *Kalakeran* Untuk Pembangunan

Setelah diberlakukannya UUPA, pemanfaatan tanah *kalakeran* untuk pembangunan di Kabupaten Minahasa menghadapi beberapa kendala-kendala antara lain :⁹¹

- 1) Untuk tanah *kalakeran* desa/negeri di mana masyarakat mengetahui tanah tersebut adalah tanah *kalakeran* desa/negeri, akan tetapi sudah diambil oleh kepala desa dan perangkat desa dan tanah tersebut sudah bersertifikat menjadi hak milik, jadi untuk dimanfaatkan harus ada ganti rugi oleh pemerintah. Padahal tanah *kalakeran* tersebut setelah berlaku UUPA sudah diserahkan kepada pemerintah desa.
- 2) .Kendala yang penulis temui secara langsung dalam pemanfaatan tanah *kalakeran* desa/negeri untuk pembangunan yaitu tanah *kalakeran* desa/negeri, sebagian tanahnya diperbatasan-perbatasan desa dengan desa, apabila desa satu memanfaatkan untuk pembangunan, desa satu

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ *Ibid*

menyatakan bahwa tanah itu adalah milik mereka maka, sering terjadi konflik antar desa disebabkan batas-batas desa yang tidak jelas.

- 3) Tanah *kalakeran* desa/negeri tidak semua terdaftar dalam buku register desa, sehingga ada warga masyarakat yang mengerjakan tanah *kalakeran* desa/negeri dan menganggap sebagai miliknya, karena mereka aktif membayar pajak. Apabila akan dimanfaatkan untuk pembangunan mereka tetap mempertahankan tanah tersebut sebagai hak miliknya. Sesuai keterangan kepala desa, tanah *kalakeran* desa/negeri hanya dipinjamkan kepada yang tidak memiliki tanah untuk ditanami tanaman bermusim. Ternyata masyarakat sudah menanam tanaman keras.
- 4) Kendala untuk memanfaatkan tanah *kalakeran* keluarga/famili untuk pembangunan yaitu : harus ada kesepakatan dari keluarga/famili dalam pemanfaatan tanah tersebut.

BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah penulis peroleh dikaitkan dengan permasalahan yang dikemukakan dalam Bab Pendahuluan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tanah *kalakeran* kenyataannya masih tetap ada di Kabupaten Minahasa, baik tanah desa/negeri maupun tanah *kalakeran* keluarga/famili. Tanah *kalakeran* identik dengan hak ulayat, eksistensi tanah *kalakeran* desa/negeri saat ini dapat dikesampingkan untuk digunakan bagi kepentingan pembangunan, sedangkan tanah *kalakeran* keluarga/famili masih dapat dipertahankan oleh keluarga untuk memelihara kekerabatan dan kelestarian budaya.
2. Tanah *kalakeran* desa/negeri yang terletak di perbatasan desa tetangga ternyata tidak jelas batas-batasnya, hal ini berdampak timbulnya konflik antar desa yang ingin memanfaatkan tanah tersebut. Tanah *kalakeran* keluarga/famili, batas-batasnya masih tegas tapi pemiliknya tidak bersedia melepaskan haknya untuk diambil alih pihak desa.

Masyarakat umumnya bersikap mendukung/setuju jika tanah *kalakeran* desa/negeri dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan, akan tetapi terhadap pemanfaatan tanah *kalakeran* keluarga/famili ternyata mereka menolak. Masyarakat menghendaki tanah *kalakeran* keluarga/famili tetap

dipertahankan sebagai tanah Adat yang khusus digunakan untuk menyokong ekonomi keluarga sehari-hari dan mempertahankan kekerabatan.

5.2. Saran-saran

Dalam hal ini, penulis akan menyarankan agar seluruh masyarakat Desa Taraitak yang ada dan Pemerintah, khususnya dalam permasalahan tanah *kalakeran* ini harus lebih memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agar eksistensi tanah *kalakeran* jelas (luas obyek, letak dan subyeknya) sehingga tidak menimbulkan konflik antar desa dalam pemanfaatannya, perlu segera dilakukan inventarisasi khususnya *kalakeran* desa/negeri.
2. Oleh karena tanah *kalakeran* keluarga/famili masih tetap dipertahankan oleh kelompok keluarga yang berhak, perlu diinventarisasi dan sebaiknya segera dicarikan jalan keluar terhadap cara sertifikasinya untuk menghindari konflik pemanfaatan oleh anggota kelompok dalam masyarakat yang tentunya tidak sesuai dengan tujuan untuk memelihara kekerabatan dalam masyarakat.

Untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai pemilik tanah *kalakeran*, maka diharapkan Pemerintah Pusat dan Daerah serta instansi terkait (BPN) dapat segera merumuskan suatu peraturan tertulis yang jelas mengenai tanah *kalakeran*, demi kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah-tanah *kalakeran* tersebut.

RINGKASAN

Persoalan tentang tanah dan pertanahan di negara Indonesia dewasa ini merupakan suatu persoalan yang banyak sekali mendapat perhatian dari berbagai pihak yang meninjaunya dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini disebabkan oleh karena peka dan sensitifnya masalah dimaksud dalam kehidupan bermasyarakat yang bukan hanya sekedar menyangkut aspek ekonomis dan kesejahteraan semata, akan tetapi mempunyai kaitan yang erat sekali dengan masalah sosial, politis, yuridis, psikologis, kulturil dan religius.

Satu di antara sekian banyak permasalahan yang dihadapi berkenaan dengan soal tanah ini adalah mengenai persoalan tanah yang terletak dalam lingkungan suatu masyarakat hukum adat yang kadang-kadang terjadi benturan antara persoalan kewenangan masyarakat hukum adat setempat di satu pihak dan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan tanah-tanah untuk kepentingan pembangunan yang dapat menghambat lajunya pembangunan di negara Indonesia. Hal yang demikian perlu mendapat perhatian yang serius dalam rangka melaksanakan Politik Agraria Nasional.

Berdasarkan atas kenyataan ini, maka tanah dalam masyarakat hukum adat mempunyai arti dan status yang tersendiri bilamana dibandingkan dengan harta benda lainnya, oleh karena itu masalah tentang tanah mempunyai kaitan yang sedemikian eratnya dengan kewenangan dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, baik yang menyangkut

kewenangan dari masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah yang masih ada dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun dalam hubungannya dengan penguasaan tanah oleh warga masyarakat yang bersangkutan untuk memanfaatkan tanah tersebut, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka masyarakat hukum adat mempunyai suatu kewenangan terhadap tanah-tanah yang ada di dalam lingkungan dan pada persekutuan tersebut. Wewenang mana berpokok pangkal pada suatu hak penguasaan berdasarkan hak mana masyarakat hukum adat dapat mengelola tanah-tanah tersebut untuk kepentingan bersama. Dalam hubungan ini setiap warga masyarakat yang ingin mendapatkan manfaat atas sebidang tanah yang ada di dalam persekutuan harus dengan sepengetahuan dan seizin dan pada kepala masyarakat hukum adat setempat.

Di Sulawesi Utara (khususnya di Kabupaten Minahasa) terdapat hampan tanah adat yang dikenal sebagai tanah *kalakeran*. Tanah *kalakeran* tersebut pada kenyataannya masih ada. Dalam perkembangan sekarang, dengan meningkatnya kebutuhan dan terbatasnya persediaan tanah untuk pembangunan, menyebabkan tanah *kalakeran* sebagai tanah adat mendapat perhatian sebagai salah satu alternatif pengadaan lahan pembangunan, walaupun sebenarnya berbicara mengenai masalah tanah "*kalakeran*" di Minahasa yang sejak bertahun-tahun tersebut adalah masalah

yang rumit.

Namun penyelesaian yang wajar terhadap masalah ini dapat meningkatkan produksi pangan dan memperbaiki gizi masyarakat. Masalah tanah "*kalakeran*" di Minahasa ini berada di bidang hukum adat dan mempunyai hubungan langsung dengan hukum waris.

Masalah-masalah yang diketengahkan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Mengenai keluarga memanfaatkan tanah adat *kalakeran* untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari ;
2. Kendala-kendala yang dihadapi bila tanah *kalakeran* di Desa Taraitak Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa digunakan untuk pembangunan.

Dari analisa yuridis empiris yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tanah *kalakeran* masih tetap ada di Kabupaten Minahasa, baik tanah desa/negeri maupun tanah *kalakeran* keluarga/famili. Tanah *kalakeran* identik dengan hak ulayat, eksistensi tanah *kalakeran* desa/negeri saat ini dapat dikesampingkan untuk digunakan bagi kepentingan pembangunan, sedangkan tanah *kalakeran* keluarga/famili masih dapat dipertahankan oleh keluarga untuk memelihara kekerabatan dan kelestarian budaya.
- b. Tanah *kalakeran* desa/negeri yang terletak di perbatasan desa tetangga ternyata tidak jelas batas-batasnya, hal ini berdampak timbulnya konflik antar desa yang ingin memanfaatkan tanah tersebut. Tanah *kalakeran*

keluarga/famili, batas-batasnya masih tegas tapi pemiliknya tidak bersedia melepaskan haknya untuk diambil alih pihak desa. Untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai pemilik tanah *kalakeran*, maka diharapkan Pemerintah Pusat dan Daerah serta instansi terkait (BPN) dapat segera merumuskan suatu peraturan tertulis yang jelas mengenai tanah *kalakeran*, demi kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah-tanah *kalakeran* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1987, ***Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional***, Alumni, Bandung.
- , 1976, ***Masalah Undang-undang Pokok Agraria dan Praktek Pelaksanaannya***, Fakultas Hukum UNLAM.
- Ardiwilaga. R. Roestandi, 1962, ***Hukum Agraria Indonesia***, Masa Bakti, Jakarta.
- Adam, L., 1975, ***Pemerintah di Minahasa***, Bhratara, Jakarta.
- , 1976, ***Adat Istiadat Suku Bangsa Minahasa***, Bhratara, Jakarta.
- Adiwinata, 1976, ***Pengertian Hukum Adat Menurut UUPA***, Alumni, Bandung.
- Anonim, 1992, ***Hukum Tanah di Sulawesi Utara***, Pengadilan Tinggi Manado.
- Akbar, Purnomo Setiady dan Husaini Usman, 1995, ***Metodologi Penelitian Sosial***, Bumi Aksara, Jakarta.
- Dijk, Van, 1964, ***Pengantar Hukum Adat Indonesia***, Sumur, Bandung.
- Harsono, Boedi, 1999, ***Undang-undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya Hukum Agraria di Indonesia, Bagian Pertama, Jilid Pertama***, Djambatan, Jakarta.
- , 2002, ***Hukum Agraria Indonesia, (Himpunan Peraturan Hukum Tanah)***, Djambatan, Jakarta.
- Holleman, F.D. Tanpa Tahun, ***Verslag van een onderzoek inzake Adatgrondenrecht in de Minahasa***.
- Hadi, Sutrisno, 2000, ***Metodologi Research Jilid II***, Psikologi UGM, Yogyakarta.
- H.M. Taulu, 1967, ***Sejarah Kotamadya Manado***, Yayasan Pembangunan, Tomohon.
- , ***Adat dan Hukum Adat Minahasa***, Yayasan Pembangunan, Tomohon.

- Kalangi, F.X., Tanpa Tahun, ***Inventarisasi Tanah-tanah Kalakeran di Minahasa Dewasa ini***, LPM FH UNSRAT, Manado.
- Kartasapoetra, G, et. al. 1986, ***Desa dan Daerah Dengan Tata Pemerintahannya***, Bina Aksara, Jakarta.
- Kumaunang, R., et. al. 1994, ***Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Sulawesi Utara***, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Mahadi, 1991, ***Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak Tahun 1854***, Alumni, Bandung.
- Mertokusumo, dan Iswanto, H. 1988, ***Pendaftaran Hak Atas Tanah Menurut UUPA***, Karunika, Jakarta.
- Muhammad, B. 1985, ***Pokok-Pokok Hukum Adat***, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Marzuki, 2002, ***Metodologi Riset***, PT. Prasetia Widya Pratama, Yogyakarta.
- Mamuji, Sri dan Soerjono Soekanto, 2001, ***Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat***, Rajawali, Jakarta.
- Parlindungan A. P. 1987, ***Landerform di Indonesia***, Alumni, Bandung.
- Rangemihardja, R. A. 1982, ***Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia***, Tarsito, Bandung.
- Ruchiyat, E. 1991, ***Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA***, Alumni, Bandung.
- Soepomo, 1967, ***Bab-bab Tentang Hukum Adat***, Penerbit Universitas, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, ***Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri***, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerodjo, 1990, ***Hukum Agraria***, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudiyat, I., 1982, ***Beberapa Masalah Mengusahakan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang***, Liberty, Yogyakarta.
- , 1981, ***Hukum Adat Sketsa Asas***, Liberty, Yogyakarta.

Saragih, Djaren, 1984, **Pengantar Hukum Adat di Indonesia**, Tarsito, Bandung.

Susanto, R. 1984, **Hukum Pertanahan (Agraria)**, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2001, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Ter Haar Bzn, 1985, **Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat**, Terjemahan, Soebekti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta.

Thalib, S. 1985, **Hubungan Tanah Adat Dengan Hukum Agraria di Minangkabau**, Bina Aksara, Jakarta.

Vollenhoven, C. Van. 1972, **Suatu Kitab Hukum Adat Untuk Seluruh Hindia Belanda**, (diterjemahkan oleh M. Rasyad dan Suleman). Bhratara, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Bagian proyek Peningkatan Publikasi Pemerintah, Departemen Penerangan RI, Jakarta.

Adatrechtbundel III

Staatsblad 1870 No. 188 jo **Staatsblad** 1875 No. 199 a

Staatsblad 1881 No. 80

C. Majalah/Koran :

Tanah Kalakeran di Minahasa Dewasa ini, Majalah BPHN Tahun I No. 3 1975.

Benarkah Hukum Agraria Nasional Berdasarkan Hukum Adat, Harian Sinar Harapan Tanggal 29 September 1975.